

SKRIPSI

**MEMBANGUN AKUNTABILITAS LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT DI INDONESIA TIMUR
(STUDI KASUS LEMBAGA TANAHINDIE DALAM PROGRAM
PRE-EVENT MAKASSAR BIENNALE 2020)**

REGINA MEICIEZA SWEETLY

A031171003



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

MEMBANGUN AKUNTABILITAS LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI INDONESIA TIMUR (STUDI KASUS LEMBAGA TANAHINDIE DALAM PROGRAM *PRE-EVENT* MAKASSAR BIENNALE 2020)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**REGINA MEICIEZA SWEETLY
A031171003**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

MEMBANGUN AKUNTABILITAS LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI INDONESIA TIMUR (STUDI KASUS LEMBAGA TANAHINDIE DALAM PROGRAM PRA-EVENT MAKASSAR BIENNALE 2020)

disusun dan diajukan oleh

REGINA MEICIEZA SWEETLY

A031171003

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 16 Agustus 2022

Pembimbing I



Darmawati, S.E., Ak., M. Si, CA., AseanCPA
NIP 19670518 199802 2 001

Pembimbing II



Dr. Aini Indrijawati, S.E., Ak., M. Si, CA., AseanCPA.,CWM^(R)
NIP 19681125 199412 2 002



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., CRA., CRP
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

MEMBANGUN AKUNTABILITAS LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI INDONESIA TIMUR (STUDI KASUS LEMBAGA TANAHINDIE DALAM PROGRAM PRA-EVENT MAKASSAR BIENNALE 2020)


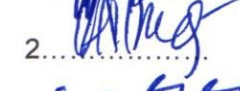


disusun dan diajukan oleh

REGINA MEICIEZA SWEETLY

A031171003

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 6 Oktober 2022 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Darmawati, S.E., Ak., M. Si, CA., AseanCPA	Ketua	1..... 
2	Dr. Aini Indrijawati, S.E., Ak., M. Si, CA., AseanCPA.,CWM ^(R)	Skretaris	2..... 
3	Prof. Dr. Syarifuddin, S.E., Ak., M. Soc, Sc, CA	Anggota	3..... 
4	Muhammad Irdam Ferdiansah, S.E., M.Acc., Ph. D	Anggota	4..... 



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., CRA., CRP
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Regina Meicieza Sweetly
NIM : A031171003
jurusan/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan penelitian skripsi yang berjudul

**MEMBANGUN AKUNTABILITAS LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI
INDONESIA TIMUR
(STUDI KASUS LEMBAGA TANAHINDIE DALAM PROGRAM *PRE-EVENT*
MAKASSAR BIENNALE 2020)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 6 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,



Regina Meicieza Sweetly

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan kasih-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program Strata Satu (S1) Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini. Pertama-tama kepada oma Lidwina, ibunda Agnes Uniritha, dan ayah Ezrom, saudara-saudara; Odelia, Maura, Jowi, Yvaine dan Emiko serta seluruh keluarga besar peneliti di mana pun berada.

Terima kasih kepada Direktur Tanahindie, Kak Anwar Jimpe Rachman, bersama isteri Kak Fitriani Dalay, dan anak tercinta Isobel yang telah menerima saya belajar dan mengizinkan saya meneliti di Lembaga Tanahindie dan Makassar Biennale. Terima kasih kepada rekan-rekan belajar sekaligus rekan kuliner ceria saya Kak Wilda, Aziziah, Avi, Yuyun, Feby, Rafsan, dkk. Terima kasih kepada Ade Cakra atas diskusi-diskusi dan humor intelektualnya selama saya berproses dan ber-progress di Kampung Buku, Terima kasih kepada kak Ato', kak Wahyu, dan Firdha atas suguhan kopinya selama ini. Tak lupa para pujangga dan pejuang kebudayaan, Kak Daus, Om Uccang, Kak Anjar, Kak Aden, Kak Ochank dan kawan-kawan lainnya yang tak sempat saya sebutkan satu per satu.

Terima kasih kepada para sahabat sejak awal perkuliahan di FEB Unhas; Yuli, Adya, Rezky, Dinda, Kamelia, Ayu, dan Ellen, teman seangkatan Immortal 2017, Keluarga besar mahasiswa FEB Unhas angkatan 2017, Keluarga Mahasiswa Katolik FEB Unhas dan PMKO FEB UH atas perhatian dan dukungannya. Tak lupa juga, rekan-rekan aktivis yang menemani saya berproses

di Komite Anti KS Unhas, diantaranya Faiz, Icha, Fifah, Lulu, Andira, Arinda, Rezky, Alya, Ainun, Saka, Alif, Beato dkk yang tak dapat saya sebut satu-per satu.

Ucapan terima kasih saya kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si. beserta seluruh jajarannya. Terima kasih kepada Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., CRA., CRP selaku ketua jurusan, dan kepada Prof. Dr. Gagaring Pagalung, SE., MSi., Ak., CA selaku penasehat akademik.

Ucapan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Dr. Darmawati, S.E., Ak., M. Si, CA., AseanCPA dan Dr.Aini Indrijawati S.E., Ak., M.,Si, CA., Asean CPA., CWM selaku pembimbing I dan II atas waktu, bimbingan dan dukungannya selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini. Terima kasih kepada Prof. Dr. Syarifuddin, S.E., Ak., M. Soc., CA dan Bapak Muhammad Irdam Ferdiansah, S.E., M. Acc., Ph. D selaku penguji yang telah memberi kritik dan masukan terhadap penelitian ini. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak H. Amiruddin, M.Si., Ak., CA. atas bimbingannya dalam penyusunan artikel skripsi ini. Terakhir, kepada semua pihak yang telah membantu peneliti secara langsung maupun tidak langsung, maaf saya tidak dapat saya sebutkan satu per satu pada halaman pra kata ini.

Akhir kata, semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Akuntansi.

Makassar, 10 Agustus 2022

Regina Meicieza Sweetly

ABSTRAK

MEMBANGUN AKUNTABILITAS LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI INDONESIA TIMUR (STUDI KASUS LEMBAGA TANAHINDIE DALAM PROGRAM PRA-EVENT MAKASSAR BIENNALE 2020)

BUILDING ACCOUNTABILITY OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN EAST INDONESIA (CASE STUDY OF TANAHINDIE INSTITUTION IN THE MAKASSAR BIENNALE PRE-EVENT PROGRAM 2020)

Regina Meicieza Sweetly
Darmawati
Aini Indrijawati

Penelitian ini bertujuan untuk membangun bentuk akuntabilitas Lembaga Swadaya Masyarakat dengan perspektif non-dikotomi lewat studi kasus Lembaga Tanahindie sebagai pintu gerbang melihat akuntabilitas LSM di Indonesia Timur. Metode yang dipakai ialah Grounded Theory untuk menjelajahi wilayah baru penelitian akuntabilitas LSM yang belum pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya. Teknik penelitian yang dilakukan yaitu partisipasi langsung, observasi, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lembaga Tanahindie sebagai agent yang menyelenggarakan program, akuntabilitasnya terletak pada 'Akuntabilitas Program' menurut tangga akuntabilitas Stewart (1984). Terdapat pertentangan antara teori dengan temuan lapangan, bahwa pola yang terjalin antara Lembaga Tanahindie dengan penerima manfaat adalah egaliter, kolaboratif, demokratis, partisipatoris, dan desentralisasi sebagai upaya dekolonisasi. Penelitian ini menemukan bahwa kunci penerapan akuntabilitas LSM (Lembaga Tanahindie dan para penerima manfaat) terletak pada aktivitas jurnalistik dan tercermin dalam produk jurnalistik yang dihasilkan.

Kata Kunci : Akuntabilitas LSM, Desentralisasi, Dekolonisasi, Program dan Jurnalisme.

This study aims to build a form of accountability of Non-Governmental Organizations with a non-dichotomous perspective through a case study of the Tanahindie Institution as a gateway to see the accountability of NGOs in Eastern Indonesia. The method used is Grounded Theory to explore new areas of NGO accountability research that have not been discussed by previous researchers. The research techniques used were direct participation, observation, interviews, and focus group discussions (FGD). The results of the study show that the role of the Tanahindie Institute as an agent that organizes the program, accountability lies in 'Program Accountability' according to the Stewart (1984) accountability ladder. There is a conflict between theory and field findings, that the pattern that exists between the Tanahindie Institution and the beneficiaries is egalitarian, collaborative, democratic, participatory, and decentralized as decolonization efforts. This study found that the key to implementing the accountability of NGOs (Tanahindie Institute and the beneficiaries) lies in their journalistic activities and is reflected in the journalistic products they produce.

Keywords : NGO Accountability, Decentralization, Decolonization, Program and Journalism.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR DIAGRAM.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Kegunaan Teoretis.....	7
1.4.2 Kegunaan Empiris.....	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Definisi Lembaga Swadaya Masyarakat	9
2.2 Perkembangan Manajerialisme LSM di Sektor Pendidikan, Seni, & Kebudayaan Kontemporer	12
2.2.1 Konteks Global.....	12
2.2.2 Konteks Indonesia.....	16
2.2.3 Sejarah Singkat Akuntabilitas Lembaga Swadaya Masyarakat	18
2.3 Teori Agensi/ <i>Agency Theory</i> sebagai Lensa Penelitian	21
2.3.1 Hubungan antara Pihak Donor (<i>Principal</i>) dengan Lembaga Tanahindie (<i>Agent</i>).....	24
2.3.2 Hubungan antara LSM (<i>Agent</i>) dengan Kolaborator/Penerima Manfaat (<i>Sub-Agents</i>).....	27
2.4 Teori Pemangku Kepentingan/ <i>Stakeholder Theory</i> sebagai Lensa Penelitian	28
2.5 Kontrak/ <i>Contracting Theory</i> sebagai Lensa Penelitian.....	30
2.6 Tangga Akuntabilitas Stewart (1984)/ <i>Stewart Ledder of Accountability</i> 32	32

2.7	Penelitian Terdahulu.....	38
3.1	Rancangan Penelitian	46
3.2	Kehadiran Peneliti	47
3.3	Lokasi Penelitian.....	48
3.4	Sumber Data.....	48
3.5	Teknik Pengumpulan Data	49
3.5.1	Tinjauan Literatur.....	49
3.5.2	Observasi Partisipan	50
3.5.3	Wawancara Semi-Terstruktur	51
3.5.4	Diskusi Fokus Terarah/ <i>Focus Group Discussion</i>	52
3.6	Analisis Data	52
3.7	Pengecekan Validitas Temuan Penelitian	53
3.8	Tahap-Tahap Penelitian.....	55
BAB IV HASIL & PEMBAHASAN.....		56
4.1	Gambaran Umum.....	56
4.2	Hasil Observasi, Wawancara, Diskusi Kelompok Terfokus/FGD dan Iterasi terhadap Informan Lembaga Tanahindie (<i>Agents</i>).....	61
4.2.1	Tipologi Lembaga Tanahindie (Makassar)	61
4.2.2	Tata Kelola dan Nilai yang Saling Terkait	69
4.2.3	Kontrak antara Pihak Donor atau Sponsor dengan LSM.....	74
4.3	Aktivitas Jurnalistik Sebagai Bentuk Akuntabilitas (6 Kota)	83
4.4	Hasil Observasi, Wawancara, Diskusi Kelompok Terfokus/FGD dan Iterasi terhadap Kolaborator/Penerima Manfaat (<i>Sub-Agents</i>)	91
4.4.1	Nabire.....	91
4.4.2	Labuan Bajo	93
4.4.3	Parepare.....	98
4.4.4	Bulukumba	102
4.4.5	Pangkep	104
4.5	Pengkodean dan Konseptualisasi terhadap Hasil Observasi, Wawancara, dan Diskusi Kelompok Terfokus (<i>FGD</i>).	106
AB V PENUTUP.....		120
5.1	Simpulan	120
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	121
5.3	Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....		123
LAMPIRAN.....		128

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Table 2.1 Deskripsi Tangga Akuntabilitas Stewart (1984)	35
Table 2.2 Penelitian Terdahulu	38
Table 4.1 Item Honorarium dalam RAB <i>Pra-Event</i> Makassar Biennale 2020	73
Table 4.2 Tabel Pengkodean	106
Table 4.3 Rangkuman Implementasi Akuntabilitas Lembaga Tanahindie	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Rerangka Konsep Teori Agensi.....	23
Gambar 2.2 Ilustrasi Hubungan antara Donor dan LSM.....	25
Gambar 2.3 Ilustrasi Hubungan antara LSM dengan Penerima Manfaat	27
Gambar 2.4 Ilustrasi Pemangku Kepentingan.....	30
Gambar 2.5 Ilustrasi Tangga Akuntabilitas Stewart (1984)	37
Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran.....	45
Gambar 2.7 Tahap-tahap Penelitian	55
Gambar 4.1 Pemetaan Interdependensi Jaringan Ko-Laboratorium KB.....	59
Gambar 4.2 Awan Kata.....	63
Gambar 4.3 Ilustrasi Hubungan antara Goethe, Lembaga Tanahindie, dan Makassar Biennale	80
Gambar 4.4 Awan Kata.....	102
Gambar 4.5 Kepemilikan Usaha	110
Gambar 4.6 Kriteria Intrinsik	111
Gambar 4.7 Manajemen Program.....	112
Gambar 4.8 Manajemen Jaringan.....	113
Gambar 4.9 Manajemen Keuangan	113
Gambar 5.0 Manajemen Konflik.....	114

DAFTAR DIAGRAM

Diagram	Halaman
Diagram 2.1	21

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
LAMPIRAN 1: BIODATA PENULIS.....	129
LAMPIRAN 2: CATATAN LAPANGAN.....	132
LAMPIRAN 3: FOTO-FOTO DI LOKASI PENELITIAN.....	136
LAMPIRAN 4: FORM PERSETUJUAN WAWANCARA/FGD.....	142
LAMPIRAN 5: E-MAIL DARI PIHAK DONOR/PENYANDANG DANA.....	144
LAMPIRAN 6: DAFTAR KONTAK INFORMAN.....	149

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi mengenai akuntabilitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berkembang seiring dengan dinamika perubahan formasi masyarakat sipil di tataran akar rumput. Tipologi maupun formasinya menjadi sangat beragam sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik di masing-masing tempat/wilayah. Beberapa penelitian tentang akuntabilitas yang dibahas secara khusus dan terperinci antara lain (M. K. Dewi, 2017; Manochin, dan Belal, 2021; Uddin dan Belal, 2019; Cordery, Belal, dan Thomson, 2019a; Bawole dan Langnel, 2016; Damayanti et. al., 2012; Rixon, 2012; Unerman and O'Dwyer, 2006a). Berdasarkan penelitian tersebut di atas, penelitian akuntabilitas masih didominasi oleh penelitian pada organisasi pemerintahan. Perkembangan *New Public Management (NPM)* mempromosikan teknik dan metode manajemen sektor privat yang “seperti bisnis” yang mempengaruhi manajemen di banyak organisasi sektor publik, antara lain lembaga/organisasi sosial, agama, Pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan yayasan. *NPM* dilandasi oleh pengembangan teori pilihan publik/*public choice theory*, teori biaya transaksi ekonomi/*transaction cost economics*, dan teori agensi/*agency theory* yang berfokus pada oportunisme (Bogt and Tillema, 2016; Kurunmäki and Miller, 2011; Speklé and Verbeeten, 2014). Maka, penelitian ini berusaha untuk melakukan penjelajahan terhadap praktik akuntabilitas di sektor yang menerapkan regulasi gabungan/*hybrid*, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Masyarakat Sipil. Penelitian ini merespon potensi penjelajahan ke wilayah baru yang diidentifikasi oleh peneliti sebelumnya, yaitu:

Pertama, untuk memberikan ilustrasi empiris dari praktik *New Public Management/NPM* di LSM, dengan sudut pandang non-dikotomi. Peneliti meninjau bahwa sudut pandang dikotomi justru akan membatasi pemahaman peneliti untuk membaca dan menerjemahkan realita di lapangan. Sudut pandang non/anti-dikotomi dapat mengantar penelitian ini dengan intensi yang lebih positif tentang relasi antara *principal-agent* yang digunakan sebagai pisau analisis penelitian ini. Kedua, menjelajahi potensi akuntabilitas LSM yang diidentifikasi oleh tesis M. Dewi (2017b:198) menyangkut media sosial sebagai *tools* untuk menerapkan akuntabilitas ke publik. Ketiga, menelusuri lebih dalam persepsi manajemen dan penerima manfaat program tentang akuntabilitas. Keempat, mengidentifikasi letak akuntabilitas LSM menurut tangga akuntabilitas Stewart (1984) dan menemukan mekanisme akuntabilitas yang cocok untuk Lembaga Swadaya Masyarakat di sektor Pendidikan, seni, dan kebudayaan di wilayah Makassar dan sekitarnya (Indonesia Timur).

Terdapat beberapa poin acuan yang mesti dipegang untuk memahami konteks penelitian ini, yaitu:

- 1) Mendefinisikan komunitas di sektor Pendidikan, seni, dan kebudayaan kontemporer ke dalam kategori LSM yang dibuktikan dengan Akta Notaris sebagai 'Lembaga' penting untuk memberikan legitimasi di hadapan hukum bahwa lembaga atau organisasi tersebut beroperasi secara legal, patuh terhadap pajak, sehingga dari sana mereka memperoleh akses untuk melakukan kerja-kerja dengan skala yang lebih besar dan lebih luas. Pendefinisian komunitas, kolektif, atau bentuk organisasi masyarakat sipil di tataran akar rumput lainnya ke dalam kategori LSM adalah sepatutnya terlepas dari kesimpulan premature hanya didasarkan pada keadaan/*circumstance* yang

semarak atau lesu, sebab penelitian ini menyakini bahwa dinamika yang terjadi di masyarakat adalah hal yang wajar, sebagaimana kehidupan yang tidak pernah statis. Dengan begitu, penelitian ini memecahkan stigma yang selama ini melekat di LSM/NGO, bahwa LSM tidak lagi kaku, mengerjakan proyek jangka pendek, menganalisa permasalahan secara parsial, hanya bergerak ketika masalah muncul, tetapi melampaui itu LSM/NGO ternyata dapat dikelola dengan sangat cair, bisa mengerjakan proyek jangka panjang dan berkelanjutan, menganalisa permasalahan secara holistik, melakukan kolaborasi dengan banyak pihak dan responsif.

- 2) Tidak bermaksud untuk menjadi representatif atau pusat LSM di wilayah Indonesia timur, Lembaga Tanahindie sebagai subjek penelitian ini dipandang sebagai gerbang atau pintu masuk untuk melihat jalinan interaksi LSM sektor Pendidikan, Seni, dan Kebudayaan Kontemporer dan persepsi mereka tentang akuntabilitas baik itu sebagai kontributor dan penerima manfaat program *pra-event* Makassar Biennale.
- 3) Fokus geografis/kewilayahan/lokus dalam penelitian akuntabilitas Lembaga Swadaya Masyarakat sangat penting, sebab konteks sosial, ekonomi, dan politik sangat mempengaruhi tipologi lembaga atau organisasi. Seperti perkembangan LSM di Indonesia yang mulai masif sejak runtuhnya pemerintahan Soeharto pada tahun 1998. Telah terjadi kebangkitan masyarakat sipil dalam gerakan-gerakan akar rumput yang terdiri atas mahasiswa, seniman, intelektual, profesional, pekerja, petani, pemimpin Islam dan aktivis LSM Hadiwinata (2003:48). Hal itu juga yang menjadi cikal bakal berdirinya Lembaga Tanahindie pada tahun 1999. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman,

dinamika sosial-ekonomi-politik di berbagai wilayah dan lapisan masyarakat ini berkembang, sehingga penting untuk merespon persoalan yang ada berdasarkan kewilayahan yang memiliki tipologi yang berbeda, Tipologi yang dimaksud dalam penelitian ini bisa dimaknai sebagai sifat/watak. Terbentuknya tipologi lembaga/organisasi tentu melalui proses historis dan relasi yang panjang. Melalui beragam kendala, trauma dan pembelajaran yang sedikit-banyak akan disinggung dalam penelitian ini.

- 4) Memahami bahwa pemilik atau penyelenggara LSM merupakan para pengusaha sosial/pengusaha ideologis/*social entrepreneur*. Mereka berupaya untuk mengelola sumber daya keuangan dan non-keuangan, aset terlihat (*tangible*) dan aset tak terlihat (*intangible*) untuk memaksimalkan pencapaian tujuan sosial/ tujuan apapun yang terkait dengan nilai-nilai atau ideologi yang mereka yakini. Maka cara kita memahami LSM yaitu dengan memahami nilai intrinsik dan cara mereka bekerja yang cenderung berbeda dengan nilai dan cara kerja pemerintah dan perusahaan yang bersifat kapitalistik.
- 5) Berkaitan dengan poin satu, penelitian ini menyadari adanya kecenderungan pembangunan di berbagai sektor yang berpusat di Indonesia Barat/ tersentralisasi di Jawa dan sekitarnya. Di mana Jawa sebagai pusat niaga dan industri menjadi patokan utama pembangunan dan modernitas. Dari sana tercermin apa yang terjadi secara global di mana Indonesia sebagai negara dunia ketiga atau negara *periphery* dijadikan sebagai pemasok sumber daya bagi pembangunan yang terjadi di negara-negara adidaya Eropa dan Amerika yang merupakan *core*/pusat/inti dunia. Cara pandang sentralistik ini berusaha dihindari bahkan ingin dilawan atau setidaknya

dinetralsir oleh LSM maupun organisasi-organisasi akar rumput lainnya di berbagai sektor di Indonesia Timur. Hal ini berpengaruh terhadap pemilihan isu dan wacana yang diangkat sebagai bahan untuk produksi dan reproduksi ilmu pengetahuan dan disalurkan lewat berbagai macam bentuk produk jurnalistik.

Eksplorasi penelitian ini juga merespon penelitian Turbide and Hoskin (1999:77-79) yang menemukan fakta bahwa manajemen akuntansi dan seni ibarat kendaraan yang bersilaju pada lintasan yang berbeda dalam skala/rentang waktu yang sama, sedangkan mereka selalu saling terkait satu sama lain. Penelitian ini mempunyai keprihatinan yang sama, sistem Pendidikan kapitalistik dipatok dengan standar-standar dan dengan sengaja mempromosikan spesialisasi justru menimbulkan dikotomi-dikotomi dalam ilmu pengetahuan. Hal itu juga yang melanggengkan stigma yang melekat bahwa manajemen akuntansi membatasi kreativitas seniman dengan pengendalian biaya produksi/biaya menyelenggarakan *event* yang dikontrol sangat ketat. Posisi penelitian ini berupaya selangkah lebih maju untuk melepaskan dikotomi tersebut dengan kajian akuntansi lintas disiplin untuk membangun akuntabilitas di sektor Pendidikan, seni, kebudayaan kontemporer di Indonesia Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Stewart (1984) mengonsepan tangga akuntabilitas ke dalam lima tahapan, yaitu kebenaran dan legalitas/*probity and legality*, proses/*process*, kinerja/*performance*, program/*programme*, dan kebijakan/*policy*. Untuk menilai dan menempatkan akuntabilitas Lembaga/organisasi ke anak tangga akuntabilitas, perlu untuk mengevaluai kesesuaian kriteria menurut tangga akuntabilitas tersebut. Maka untuk mengonkretkan tujuan penelitian membangun

akuntabilitas LSM di Indonesia Timur, maka perlu menjawab pertanyaan penelitian berikut:

1. Apa peran Lembaga Tanahindie dalam penyelenggaraan program *praevent* Makassar Biennale apabila dilihat menurut lensa teori agensi/*agency theory* dan teori pemangku kepentingan/*stakeholder theory*?
2. Di mana letak akuntabilitas Lembaga Tanahindie dalam tangga akuntabilitas (Stewart,1984)/*Ladder of Accountability (Stewart, 1984)*?
3. Apa persepsi/pemahaman manajemen Lembaga Tanahindie, Kolaborator dan Penerima Manfaat program mengenai akuntabilitas?
4. Bagaimana akuntabilitas LSM di Indonesia Timur mesti diterapkan menurut mereka?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah:

1. Mengetahui peran Lembaga Tanahindie dalam penyelenggaraan *praevent* Makassar Biennale apabila dilihat menurut lensa teori agensi/*agency theory* dan teori pemangku kepentingan/*stakeholder theory*.
2. Mengetahui letak akuntabilitas Lembaga Tanahindie dalam tangga akuntabilitas (Stewart,1984).
3. Mengetahui persepsi/pemahaman manajemen Lembaga Tanahindie, Kolaborator, dan Penerima Manfaat program mengenai akuntabilitas.
4. Mengetahui penerapan akuntabilitas yang cocok untuk diterapkan di LSM di wilayah Indonesia Timur.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini merespon panggilan penelitian akuntabilitas terkait, antara lain (M. K. Dewi, Manochin, and Belal, 2021; Uddin dan Belal, 2019; Cordery, Belal, dan Thomson, 2019; Bawole dan Langnel, 2016; Damayanti et. al., 2012; Rixon, 2012; Unerman and O'Dwyer, 2006); Bogt and Tillema, 2016; Kurunmäki and Miller, 2011; Speklé and Verbeeten, 2014) dan menjelajahi area baru/dimensi baru yang belum dijangkau oleh penelitian sebelumnya, khususnya di sektor Pendidikan, Seni, dan Kebudayaan kontemporer di Indonesia Timur. Selain itu, memperkaya model akuntabilitas menurut praktik manajemen Lembaga Tanahindie yang dikaji menggunakan perspektif non-dikotomi.

1.4.2 Kegunaan Empiris

Secara empiris penelitian ini menyajikan data empiris tentang pengelolaan program Makassar Biennale (*pre-event*) sebagai satu tahap dalam serangkaian proses yang Panjang. Selain itu memberikan ilustrasi dalam rupa gambar atau pola penerapan akuntabilitas yang bisa dikembangkan ataupun dimanfaatkan lebih lanjut di Lembaga Tanahindie maupun di lembaga swadaya masyarakat lainnya di wilayah Indonesia Timur.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian secara teoretis dan empiris, sistematika penulisan skripsi dan kerangka konsep.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi tinjauan pustaka mengenai definisi dan pertentangan teori yang digunakan dalam penelitian akuntabilitas LSM ini.

BAB III: METODE

Bab III berisi penjelasan mengenai rancangan penelitian, mulai dari kehadiran peneliti di lokasi penelitian, tempat dan waktu pelaksanaan penelitian, sumber data yang akan diolah dan teknik pengumpulan data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV memuat uraian terkait hasil dan pembahasan yang diperoleh.

BAB V: PENUTUP

Bab V berisi jawaban atas pertanyaan penelitian, keterbatasan penelitian, kontribusi penelitian dan saran untuk penelitian akuntabilitas LSM mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Lembaga Swadaya Masyarakat

Peneliti menghadapi tantangan dalam mendefinisikan Lembaga Tanahindie sebagai lembaga swadaya masyarakat disebabkan oleh beragamnya program yang dilaksanakan, banyaknya instrumen organisasi yang dikelola dan implikasinya terhadap manajemen yang sangat fleksibel dan cair. Fleksibilitas tersebut kemudian mempengaruhi pengategorian lembaga ke dalam suatu pemahaman umum terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat. Seperti yang dijelaskan di bagian pendahuluan skripsi ini bahwa LSM merupakan lembaga yang bergerak di dua sektor (*hybrid*). Selain itu, terdapat stigma yang melekat terhadap LSM, yaitu organisasi yang melaksanakan program jangka pendek dan eksklusif. Sifat eksklusifitas tersebut melekat disebabkan oleh adanya proses kaderisasi ketat yang mau tidak mau membedakan satu kelompok dari kelompok yang lain. Pendefinisian tersebut berusaha dihindari untuk melunturkan stigma negative LSM dengan pandangan yang lebih optimis bahwa suatu lembaga/organisasi akan terus beregenerasi dan memperbarui diri. Menurut (Cordery, Belal, and Thomson 2019), LSM dapat diidentifikasi dengan dua karakteristik utama, yaitu tujuan sosial dan kendala non distribusi/*Non-distribution Constraint (NDC)*.

Merujuk pada penelitian (Hopper et al. 2012), akan lebih mudah untuk mendefinisikan LSM berdasarkan “apa yang bukan dirinya”. Dalam terjemahan Bahasa Inggrisnya, LSM disebut sebagai *Non-Governmental Organization* yang berarti Organisasi Non-Pemerintah. Frasa non-pemerintah menyiratkan bahwa aktor maupun tata kelola LSM dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan prinsip. Jika menelisik ke belakang, Lembaga Swadaya Masyarakat

berakar pada reformasi demokratis masyarakat sipil. LSM juga berfokus pada nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, pemberdayaan, hak asasi manusia, atau solidaritas masyarakat (Hall and O'Dwyer, 2017).

Penelitian ini menganut definisi Lembaga Swadaya Masyarakat menurut Tandon. Menurut Tandon (1999), masyarakat sipil adalah bentuk inisiatif individu dan kolektif untuk kepentingan publik bersama/*common public good*. Sedangkan Menyoal akuntabilitas LSM tentu berbeda dengan pemerintah dan partai politik. LSM tidak dibentuk melalui suatu proses pemilihan umum, sebab LSM merupakan inisiatif dari masyarakat sipil itu sendiri, mewakili suara mereka sendiri. Suara dalam arti yang sangat luas, bukan *voting*. Maka dari itu, pertanyaan yang kemudian muncul, kepada siapa LSM bertanggung jawab? Dan Apakah LSM benar-benar sudah melaksanakan kegiatannya untuk kepentingan umum? Jika LSM tidak dapat menghindari eksklusifitas sebagai implikasi dari nilai-nilai yang mereka anut, bagaimana LSM mengidentifikasi apa yang menjadi milik mereka dan milik yang lain?

Lembaga Swadaya Masyarakat dalam hal ini organisasi masyarakat sipil dapat berwujud ruang/*space*, gerakan/*movement*, dan organisasi/*organization*. Lembaga Swadaya Masyarakat harus memiliki kapabilitas untuk mengatur dirinya sendiri. Menurut (Lsm, Standar, and Akuntabilitas n.d.), LSM dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi: keadilan, kesetaraan, keterbukaan, ketaatan pada hukum/aturan, dan akuntabilitas.

Sebutan lain dari LSM, antara lain Organisasi Non-Pemerintah (Ornop); Organisasi Akar Rumput (*Grass-root Organization*); Organisasi Masyarakat Sipil (*Civil Society Organization*), dan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM), dan terus menerus berkembang bahkan menguraikan dirinya ke dalam

bentuk-bentuk yang lebih kecil, seperti kolektif, sindikat, ruang terpadu komite, dan sebagainya.

Terdapat definisi yang berlaku umum di seluruh dunia, yaitu menurut Perserikatan Bangsa-bangsa.

“A non-governmental organization (NGO) is a not-for-profit, voluntary citizens’ group, which is organized on a local, national or international level to address issues in support of the public good. Task-oriented and made up of people with a common interest, NGOs perform a variety of services and humanitarian functions, bring citizens’ concerns to Governments, monitor policy and programme implementation, and encourage participation of civil society stakeholders at the community level. They provide analysis and expertise, serve as early warning mechanisms and help monitor and implement international agreements. Some are organized around specific issues, such as human rights, the environment or health (United Nations, 2005, cited by(Unerman and O’Dwyer 2006b).”

Definisi LSM menurut PBB tidaklah mutlak dipakai untuk mendefinisikan lembaga swadaya masyarakat di tingkat lokal. Namun, definisi LSM oleh PBB dengan jelas menyebutkan bahwa LSM membawa kekhawatiran masyarakat, dan mengawasi implementasi kebijakan dan program pemerintah, disaat yang bersamaan LSM juga melaksanakan aktivitas dan program-program yang bahkan didanai oleh banyak sumber donor. Adapun keprihatinan terhadap akuntabilitas LSM, yaitu donor asing yang mereka terima perlu diaudit dan diumumkan kepada publik.

Baik secara *de facto* maupun *de jure* tidak mungkin untuk mengidentifikasi dan memvalidasi satu per satu apakah sebuah LSM merupakan sebuah Lembaga amal. Seperti Loft et. al., Unerman and O’Dwyer (2006) mendemonstrasikan,

identifikasi suatu organisasi sebagai LSM semata-mata melalui sifat kegiatannya, dalam beberapa kasus, akan ditentang.

Berangkat dari definisi di atas, Tanahindie dapat digolongkan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat didasarkan pada dua hal, yaitu:

1. Secara *de facto*, Tanahindie menjalankan fungsi pelayanan masyarakat di sektor pendidikan, dan seni kontemporer dalam berbagai bentuk kegiatan/program, seperti riset/penelitian, lokakarya dan pelatihan, magang, diskusi buku, diskusi publik, pemutaran film, residensi, wicara seniman, publikasi, penerbitan cetak maupun *digital*, pameran seni rupa, pertunjukan seni, ruang baca, penerbitan, kriya, dll.
2. Secara *de jure*, Tanahindie memiliki Akta Pendirian Lembaga yang disahkan oleh Notaris & PPAT dan juga memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SITU) untuk barang/jasa penerbitan buku, penerbitan surat kabar, jurnal dan bulletin atau majalah, penerbitan lainnya, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Dengan begitu, mematahkan asumsi bahwa organisasi sebagai badan amal bukan satu-satunya kriteria sebuah organisasi disebut LSM. Selain itu, penelitian terhadap akuntabilitas badan amal tidak diterima sebagai satu-satunya pembenaran untuk mengklasifikasikan penelitian sebagai penelitian akuntabilitas LSM.

2.2 Perkembangan Manajerialisme LSM di Sektor Pendidikan, Seni, & Kebudayaan Kontemporer

2.2.1 Konteks Global

Sebelum meninjau akuntabilitas LSM di sektor seni, kita perlu terlebih dahulu melihat secara historis perkembangan manajerialisme di sektor seni, lebih spesifik perhelatan “Biennale” sebagai cikal bakal sebuah festival seni yang pertama kali diadakan

tahun 1895 di Venice, Italia yang disebut La Bienalle de Venezia. Ide tersebut lahir dari Riccardo Selvatico, seorang penyair dan dramawan yang kemudian diikuti oleh Walikota Venice, lingkaran seniman, dan para cendekiawan. Mereka mengorganisir perhelatan seni rupa secara nasional sebagai bentuk respon terhadap krisis ekonomi yang dihadapi Italia di akhir abad ke 19. Karya Lukis yang terjual menghasilkan keuntungan yang sangat banyak dan kemudian digunakan untuk menyokong perekonomian kota Venice saat itu. Menurut Biennale Foundation, Lembaga Internasional yang memantau penyelenggaraan Biennale secara global, sudah ada 300 Biennale yang terselenggara sampai tahun 2019. Di Indonesia, beberapa kota yang menyelenggarakan Biennale (perhelatan seni rupa dua tahunan), yaitu Jakarta, Yogyakarta, Sumatra, Jawa Timur, dan Makassar (Aprilia, 2021).

Bagaimana perhelatan Biennale dilakukan secara global memberikan referensi maupun inspirasi bagi penyelenggara Biennale di tingkat nasional. Baik yang di replikasi maupun yang sama sekali berbeda dari perhelatan Biennale di benua Eropa, melihat konteks wilayah, isu dan wacana ekonomi-politik, serta kultur yang jauh berbeda. Terutama penyelenggaraan Makassar Biennale yang menerapkan cara kerja yang berbeda sesuai dengan karakternya sendiri yang tidak mengikuti Biennale di wilayah lain yang selalu mengangkat "Maritim" sebagai tema besar kegiatannya (Aprilia, 2021).

Berbeda dengan perkembangan Biennale yang lahir di benua Eropa, di Amerika sendiri, pada era sekitar 1960-an dunia usaha seni mikro, tokoh dominannya ialah impresario atau pemilik sekaligus

manajer lembaga/institusi. Di bawah rezim impresario (pengusaha hiburan seperti perfilman atau pertunjukan music) ini, lembaga atau institusi seni dioperasikan dan didukung oleh pendiri yang bertindak sebagai “orangtua” atau “kepala keluarga-besar” Jeffri dalam (Turbide dan Hoskin, 1999:72). Istilah yang disematkan oleh Turbide dan Hoskin, yakni *benevolent autocrats*/autokrat yang baik hati/penuh kebajikan, dimana kekuasaan terkonsentrasi pada satu figur, yang biasanya bertanggungjawab atas masalah artistik dan keuangan.

Serupa dengan apa yang disampaikan oleh Gordon Decker dalam pidatonya pada TEDx Rapid City berjudul *Asking Hard Questions as a Non-Profit Organization*, ia menjelaskan mengenai siklus hidup dari sebuah LSM/ lembaga nirlaba; muncul, berkembang, dan mapan, cukup tiga orang untuk mendirikan sebuah LSM/organisasi nirlaba, yaitu sang pendiri, pasangannya, dan sahabatnya. Dalam perjalanannya, tiga orang dewan direksi tidaklah cukup, ia membutuhkan dukungan lebih banya pihak untuk membentuk sebuah tim kerja.

Di sekitar tahun 1960-an terjadi perpindahan dari autokrasi menjadi birokrasi dan juga administrasi seni mulai muncul di berbagai sub-sektor seni. Kedatangan administrator seni, sistem kepemimpinan ganda mulai muncul di banyak lembaga seni. Pelibatan pihak lain seperti manajer artistik/manajer program yang bertanggung jawab atas kebijakan dan keputusan artistik, ditambah manajer organisasi yang bertanggung jawab atas kegiatan belakang layar dan keuangan, tak bisa terhindarkan.

Di era 1970-an konversi organisasi ke dalam format *non-profit/nirlaba* membuat mereka harus beradaptasi dan beralih ke penerapan aturan yang lebih formal untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dari pihak badan sponsor atau pendonor. Efek dari adanya aturan yang formal tersebut, walaupun mungkin dalam praktiknya aturan-aturan tersebut hanya tersirat tidak tersurat, tidak bisa dihindari karena adanya bentuk 'kaderisasi' di dalam lembaga. Kaderisasi itulah yang kemudian menghasilkan 'regenerasi' anggota.

Secara manajemen, kemudian menghasilkan peningkatan kebutuhan akan praktik akuntansi untuk tujuan pengendalian anggaran dan audit. Peralihan cara kerja organisasi nirlaba dari non-formal menjadi formal membentuk manajerialisme hibrid. Sektor pendidikan menunjang terjadinya peralihan ini, dimana Ilmu akuntansi yang dipromosikan di sekolah-sekolah bisnis berupa "*how-to text*" (teks-teks yang berisi pedoman teknis tentang bagaimana cara); kemudian ditransfer ke beragam bentuk organisasi di seluruh dunia, dimana sistem akuntansi manajerial, berdasarkan perhitungan objektif dan indikator kinerja kuantitatif. Suatu sistem telah dibentuk untuk menyeragamkan "cara-kerja", yang dinilai cukup problematis melihat ragam bentuk LSM/ organisasi nirlaba multikultural.

Kehadiran 'administrator' membuat sistem kepemimpinan ganda mulai muncul di banyak lembaga seni. Pertama, manajer artistik yang bertanggung jawab atas kebijakan dan keputusan artistik, ditambah manajer organisasi sebagai aktor 'di belakang layar' yang bertanggung jawab terhadap kegiatan atau program dan keputusan keuangan. Kira-kira pertanyaannya seperti ini, mampukah LSM/ organisasi nirlaba di sektor seni dan kebudayaan mencapai dua

tujuan di saat bersamaan (tujuan artistik & tujuan keuangan)? (Turbide dan Hoskin, 1999:78). Paralel dengan isu tersebut, Hans Abbing berpendapat, polemik di antara para seniman itu sendiri. Jangankan berpikir untuk mempekerjakan seorang manajer seni bagi mereka, seniman mengingkari 'kodrat' keseluruhan ekonomi seni dengan menyangkal orientasi mereka terhadap pendapatan finansial. Mereka minim literasi tentang prospek-prospek keberhasilan, rentan untuk mengambil risiko, miskin tetapi sebelumnya berasal dari latar belakang yang kaya, dan cenderung menyubsidi pembuatan seni mereka dari pendapatan-pendapatan lain (Julian Stallabras, 2021:108).

2.2.2 Konteks Indonesia

Menurut Dadang Juliantara (1999), sambutan dan apresiasi masyarakat terhadap LSM semakin meningkat dan diterima oleh masyarakat. Namun tidak banyak LSM yang mampu untuk melakukan formulasi. Pekerjaan yang dilakukan oleh LSM bukan suatu bentuk kerja tanpa teori, tetapi bekerja tanpa panduan teori yang terformulasi (dirumuskan). Bekerja tanpa teori dengan bekerja tanpa panduan teori penting untuk dibedakan, sebab bagaimanapun program kerja yang dilahirkan LSM di lapangan, kecil atau besar, baik atau buruk, relevan atau tidak, pastilah bukan produk suatu keisengan belaka, tetapi dilandasi oleh suatu pemikiran dan asumsi-asumsi tertentu.

Menurut Juliantara (1999), terdapat dua aspek penting yang memberikan pengaruh yang cukup dalam terhadap kualitas kehadiran LSM di Indonesia.

Pertama, situasi internal organisasi. Signifikansi eksistensi/ keberadaan LSM pada dasarnya terletak pada kedekatannya dengan masyarakat bawah, dengan bentuk organisasi/lembaga yang non-birokratis yang menjadi kekuatan LSM untuk bergerak lebih cepat dan luwes, namun disisi lain pengelolaan yang cenderung anti-manajemen dan tidak suka akan adanya hierarki dan birokrasi di dalam organisasi. Begitu pula mereka menganggap mekanisme dan prosedur manajemen standar, misalnya pelaporan, *monitoring*, dan evaluasi atas aktivitas yang dilakukan sebagai beban administratif yang menjengkelkan ketimbang melihatnya sebagai alat kontrol untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Kedua, eksternal organisasi. LSM pada dasarnya menghadapi berbagai kesulitan yang tidak banyak memberikan pilihan kecuali melakukan kompromi secara mendasar. Relasi yang timpang dengan lembaga donor, kerap kali menjadikan desain program yang dipromosikan oleh LSM, mudah dipatahkan, dan sebaliknya LSM “terpaksa” menangani program yang secara “paradigmatik” mungkin berbeda dengan agenda awalnya. Komitmen kepada pendampingan yang cukup besar, merupakan hal lain yang menjadi dalih bagi kompromi atas berbagai “tekanan eksternal”, yang sesungguhnya mempunyai konsekuensi paradigmatik. Selain itu, tekanan dari pihak negara dengan politik perizinan dan berbagai restriksi terhadap LSM. Restriksi oleh aparat negara dilakukan sebab negara sendiri mendeteksi kelompok di luar sistem yang merongrongi ideologi Pancasila, makar, dan lainnya. Sehingga negara perlu memberi kontrol yang ketat kepada sektor yang dinilai memiliki potensi politik strategis.

Lembaga Tanahindie yang lahir pasca orde baru tentu terpengaruh oleh kedua situasi yang dijabarkan oleh Dadang Juliantara. Di satu sisi mengorganisir atau mengelola dengan landasan ideologis yang kuat, namun di sisi lain juga menempuh jalan pragmatis yang condong pada aspek kepraktisannya dengan berkompromi terhadap nilai-nilai dasar sesuai dengan pihak mana yang sedang dibersamai/ dengan siapa LSM menjalin Kerjasama.

2.2.3 Sejarah Ringkas Akuntabilitas Lembaga Swadaya Masyarakat

Lisa Jordan dan Peter Van Tuijl pada tahun 2006 dalam *NGO Accountability: Politics, Principles, & Innovations* menyebutkan bahwa perubahan dalam paradigma pembangunan telah mempengaruhi penekanan dalam diskusi tentang akuntabilitas LSM. Perdebatan tentang akuntabilitas LSM selalu mengarah pada pembangunan, keamanan, globalisasi, dan tata pemerintahan global.

Di bagian awal, mereka menjabarkan secara ringkas, sejarah akuntabilitas LSM. Mereka menyusunnya ke dalam lima silogisme. Silogisme ialah suatu rangkaian preposisi yang terdiri dari tiga bagian, di mana dua yang pertama mengarahkan isi yang ketiga, yakni kesimpulan. Silogisme ini ialah logika Barat yang dirumuskan oleh Aristoteles. Rangkaian silogisme ini disusun untuk menyajikan pola sehingga lebih mudah untuk mendiskusikan masalah yang paling penting, sekaligus mengartikulasikan pendekatan Barat untuk mengidentifikasi peranan LSM.

Silogisme pertama: Melengkapi Peranan Pemerintah (1980-1989)

- 1 Pemerintah tidak baik dalam menyediakan pelayanan publik.
- 2 LSM lebih dekat dengan publik.
- 3 LSM baik dalam menyediakan pelayanan publik.

Silogisme kedua: Munculnya Masyarakat Sipil (1989-1995)

- 1 Masyarakat sipil diperlukan dalam demokrasi.
- 2 LSM adalah masyarakat sipil.
- 3 LSM baik untuk perkembangan demokrasi.

Silogisme ketiga: Perlunya tata-pengurusan (*governance*) kelola yang baik (1995-2002)

- 1 Tata pengurusan yang baik diperlukan dalam pembangunan.
- 2 LSM tidak berbeda dengan berbagai organisasi lain dalam masyarakat sipil.
- 3 LSM harus menerapkan prinsip-prinsip tata pengurusan yang baik.

Silogisme keempat: Kembalinya Supremasi Negara (2002 dan seterusnya)

- 1 Pemerintah berperan penting untuk menjamin keselamatan dan pembangunan.
- 2 Pengaruh LSM tidak sebanding dengan kualifikasi yang dimilikinya.
- 3 LSM harus tetap berada dalam kerangka kerja pemerintah yang sah.

Silogisme kelima: Pendekatan Berdasarkan Hak-Hak Asasi (2002 dan seterusnya)

- 1 Tidak ada tata-pemerintahan global demokratis yang mendukung hak-hak asasi manusia.

2 LSM menegaskan dan mengukuhkan hak-hak asasi manusia di berbagai arena politik apapun bentuk tata pemerintahan yang berlaku di sana.

3 LSM ikut mengembangkan tata pemerintahan yang demokratis dengan menekankan arti penting kebijakan publik serta mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan publik.

Lisa Jordan dan Peter Van Tuijl melihat bahwa ada perbedaan besar di Eropa dan Amerika Serikat terhadap sektor LSM. Dari sanalah cikal bakal terbentuknya Edelman Barometer, yaitu *Barometer of Trust* yang dilakukan oleh Edelman secara konsisten yang menunjukkan LSM merupakan bentuk organisasi yang paling dipercaya di atas korporasi, pemerintah, gereja, media, serta otoritas lainnya.

Menurut *Edelman Trust Barometer Global Report* tahun 2020, varians kepercayaan menunjukkan persentase yang lebih besar jika dibandingkan dengan kompetensi LSM. Di mana persentase menunjukkan varians kepercayaan terhadap kompetensi LSM, yaitu sebesar 24% dan etika sebesar 76%. Komponen etika terdiri atas integritas sebesar 49%, tujuan sebesar 12%, dan keandalan sebesar 15%. Persentasenya ditampilkan pada diagram berikut. LSM merupakan bentuk organisasi yang paling dekat dengan jaringan sosial pribadi (di lapisan akar/paling membumi), maka dari itu memberikan informasi yang paling dapat dipercaya dibanding orang-orang di lapisan atas (media *mainstream*, para ahli, pemimpin, pemerintah, dan korporasi. Data Edelman Barometer menunjukkan

bahwa LSM yang paling mewadahi dan melayani kepentingan publik dibanding organisasi/lembaga lainnya.

Diagram Edelman Barometer tahun 2020

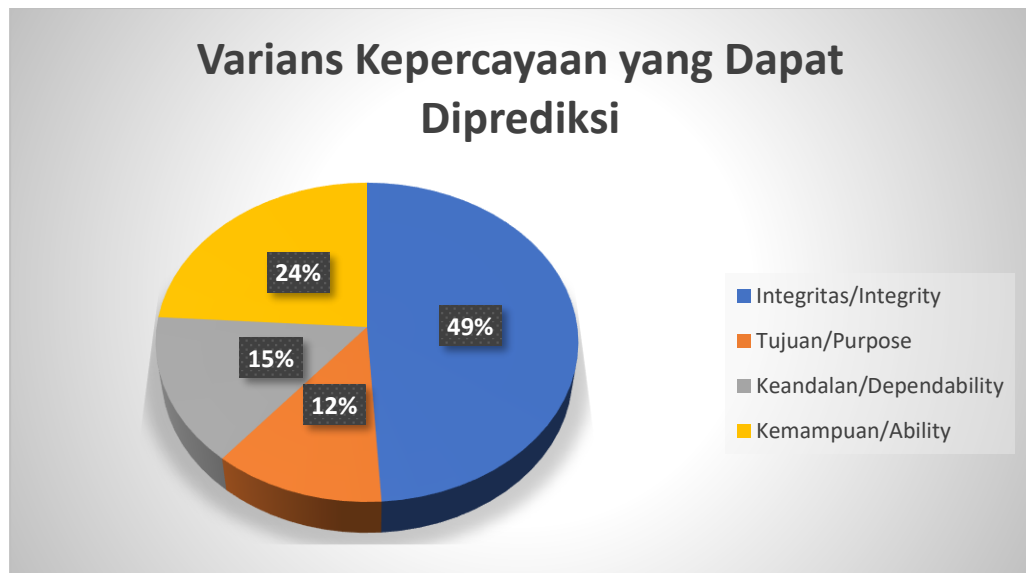


Diagram 2.1 *Persentase Varian Kepercayaan yang Dapat Diprediksi*

Sumber: *Edelman Trust Barometer (2020)*

2.3 Teori Agensi/*Agency Theory* sebagai Lensa Penelitian

Menurut Godfrey et. al. (2010), teori agensi/keagenan berbicara tentang hubungan yang timbul atas kontrak, di mana satu pihak *principal* mempekerjakan pihak lain atau mendelegasikan pekerjaan tertentu kepada *agent* untuk melakukan layanan atas nama *principal*. *Agent* dapat dipahami sebagai orang ataupun suatu badan yang secara hukum diberi kuasa untuk bertindak atas nama orang atau badan lain. Oleh karena itu, kontrak merupakan persyaratan mutlak sebagai legitimasi bagi seseorang atau badan untuk melaksanakan tugas atas nama pihak yang memberi dia tugas/tanggungjawab.

Berdasarkan kontrak tersebut, principal mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Keduanya baik *principal* maupun *agent* merupakan pemaksimal utilitas namun tidak ada jaminan bahwa pihak *agent* akan bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik *principal*. Godfrey memberi contoh kasus permasalahan agensi yaitu membujuk agen untuk berperilaku seolah-olah dia memaksimalkan kesejahteraan *principal*. Misalnya agen adalah manajer perusahaan yang memiliki insentif untuk meningkatkan konsumsi perusahaan, seperti penggunaan kendaraan, rekening pengeluaran, atau untuk pembayaran bonus dengan mengorbankan pemegang saham. Sebagai alternatif, manajer yang menghindari stress mengambil cela atas otoritas yang dia miliki untuk mentransfer kekayaan principal kepada agen jika principal tidak melakukan intervensi.

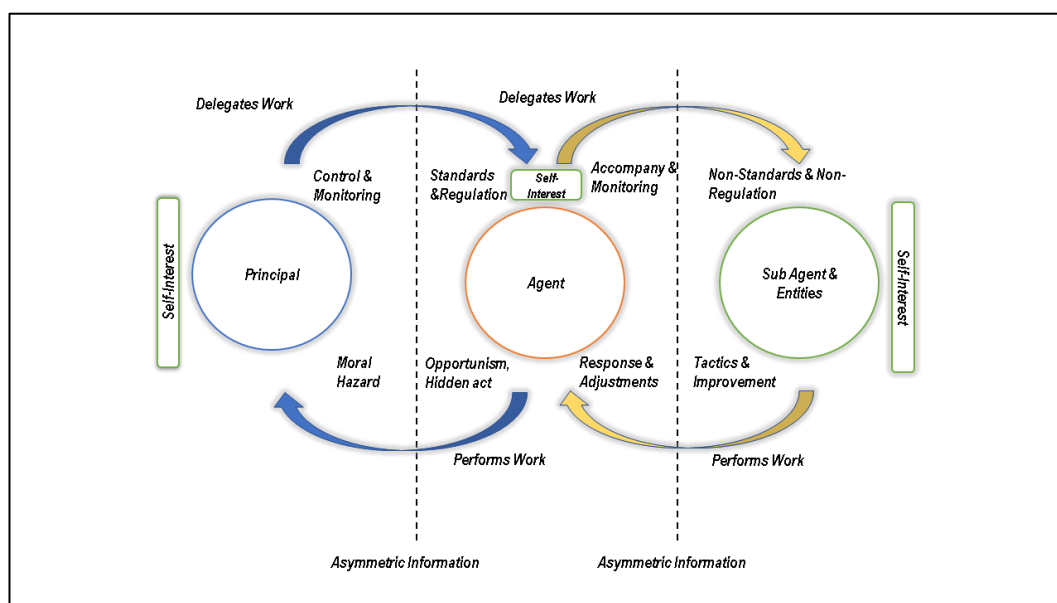
Dalam kasus Lembaga swadaya masyarakat/organisasi nirlaba, apakah permasalahan *principal-agen* serupa dengan korporasi atau pemerintah? Di manakah letak persoalan yang mungkin timbul antara *principal* dan *agent* di LSM? Apakah bentuk akuntabilitasnya satu arah melihat principal merupakan pihak donor sebagai satu-satunya sumber pemasukan LSM? Hubungan *principal-agent* mensyaratkan adanya kontrak resmi. Hal itu akan dibahas pada sub bab selanjutnya. Bagaimana kemudian teori ini bekerja pada kasus yang khusus pada Lembaga Tanahindie yang mana melakukan kerja sama dengan banyak pihak, tidak hanya pendonor.

Berdasarkan ulasan peneliti terhadap penelitian yang dilakukan Cordery, Belal, dan Thomson (2019) dengan Uddin dan Belal (2019) bahwa akuntabilitas donor LSM juga memiliki fitur pendukung yang dapat dimobilisasi/dialirkan untuk kepentingan penerima manfaat dengan kata lain

peran donor sangat kuat untuk mempengaruhi LSM dalam proses memfasilitasi akuntabilitas penerima manfaat. Maka, sudut pandang dikotomis perlu dihindari seperti yang dijelaskan di bagian pendahuluan skripsi ini. Penelitian sebelumnya menghimbau agar peneliti akuntabilitas LSM di masa depan untuk menghindari bentuk-bentuk akuntabilitas sebagai dikotomis (akuntabilitas donor versus akuntabilitas penerima). Perspektif non-dikotomis dalam hal ini ialah bahwa akuntabilitas donor memiliki fitur akuntabilitas penerima manfaat yang dapat dimobilisasi untuk keuntungan penerima manfaat (Cordery, Belal, dan Thomson, 2019; Uddin dan Belal, 2019).

Berikut ini merupakan kerangka konsep teori agensi yang diulas oleh penulis.

Kerangka Konsep Teori Agensi



Gambar 2.1 Kerangka Konsep Teori Agensi

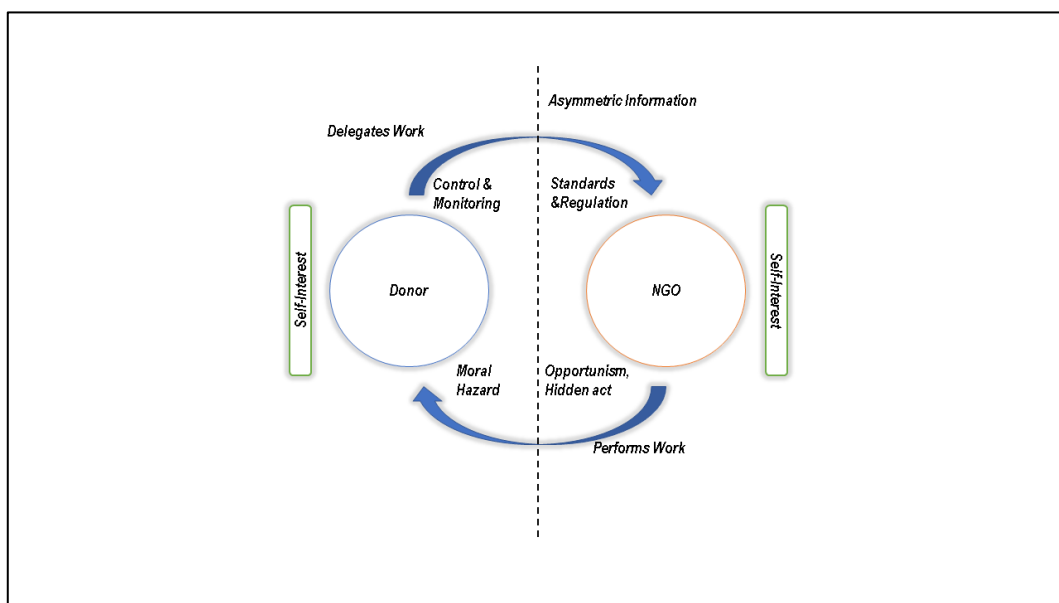
Sumber: Ulasan Penulis

2.3.1 Hubungan antara Pihak Donor (*Principal*) dengan Lembaga Tanahindie (*Agent*).

Dengan mengadaptasi kerangka konsep teori agensi, peneliti mengilustrasikan hubungan antara pihak donor/*principal* dengan LSM/*agents* seperti pada gambar 2.2 dan 2.3.

Pada gambar 2.2, lingkaran di sisi kiri merupakan pihak donor dan di sisi kanan pihak LSM/NGO. Tanda panah di bagian atas yang mengarah dari sisi kiri ke kanan menunjukkan bahwa pihak donor mendelegasikan pekerjaan/sebuah proyek kepada pihak LSM. Dengan demikian, pihak donor melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap proses maupun kinerja LSM dalam melaksanakan pekerjaan yang telah didelegasikan. Delegasi pekerjaan tersebut timbul karena adanya konsensus atau kesepakatan tertulis dan formal diantara keduanya. Beserta itu timbul hak dan kewajiban yang tertera dalam kontrak antara donor dan LSM. Ada standar-standar penyajian dan pelaporan serta regulasi yang berlaku dari pihak donor yang harus ditaati dan diterapkan oleh pihak LSM.

Ilustrasi Hubungan antara Donor dengan LSM



Gambar 2.2 Ilustrasi Hubungan antara Donor dan LSM

Sumber: Ulasan Penulis

Selanjutnya, tanda panah di bagian bawah yang mengarah dari sisi NGO/LSM ke sisi Donor berarti bahwa setelah melakukan pekerjaannya, NGO/LSM melaporkan keseluruhan proses penyelenggaraan *pre-event*, *event*, dan *pasca event* (di dalamnya termasuk capaian dan hambatan) kepada pihak donor. Dalam pelaksanaan pekerjaan dan pelaporannya kepada pihak donor, ada kemungkinan buruk maupun peluang baik yang timbul. Sikap oportunistik LSM dapat dimaknai secara negatif maupun positif, di mana sikap oportunistik tersebut bisa saja tidak dapat dideteksi sama sekali oleh pihak donor.

Oportunistik dalam arti yang negatif dapat dipahami sebagai jenis penipuan yang dilakukan oleh pihak yang menemukan diri mereka berada pada posisi untuk mendapatkan keuntungan, meskipun tidak mencari kesempatan untuk terlibat dalam penipuan. Mereka melihat

peluang untuk menghasilkan uang dengan mudah dan percaya bahwa risiko deteksi relatif rendah. Oportunisme ini bisa diidentifikasi pada skenario “laci uang terbuka”, merujuk pada istilah yang digunakan oleh Richards (2008). Yang dapat meminimalkan jenis penipuan ini ialah risiko deteksi dan hukuman yang tinggi. Seorang oportunis harus memahami konsekuensi dari setiap keputusan dan tindakan yang diambilnya, serta meningkatkan pengawasan internal, kepatuhan, dan kontrol audit.

Oportunisme dalam arti yang positif dapat dipahami sebagai sesuatu yang sangat jauh berbeda dari yang sebelumnya. Oportunisme dapat dipahami sebagai sebuah sikap atau suatu kebijakan yang ditetapkan oleh suatu badan/lembaga yang menggunakan rencana strategis pihak lain untuk membawa mereka kepada tujuan yang ingin mereka capai. Jadi, dalam posisinya sebagai *agent*, mereka akan menghadapi dua pilihan, yaitu membiarkan diri mereka diatur/diarahkan oleh pihak lain atau memastikan tujuan yang paling mungkin sesuai dengan keinginan mereka sendiri? Kedua hal tersebut mungkin terjadi secara bersamaan. Tentu ini sulit secara intelektual, dibutuhkan keterampilan “politik” agar mampu mempengaruhi tindakan orang lain untuk keuntungan kita. Karena itu, pihak *agent* mesti menjadi suatu elemen yang berguna dan memiliki daya tawar terhadap pihak donor (*principal*). Harus ada hal yang bernilai yang dapat mereka temukan/lacak untuk kemudian disodorkan kepada pihak donor (*principal*). Dalam peribahasa Indonesia “mencari kesempatan dalam kesempitan”. Peribahasa tersebut tidak selalu berkonotasi negatif,

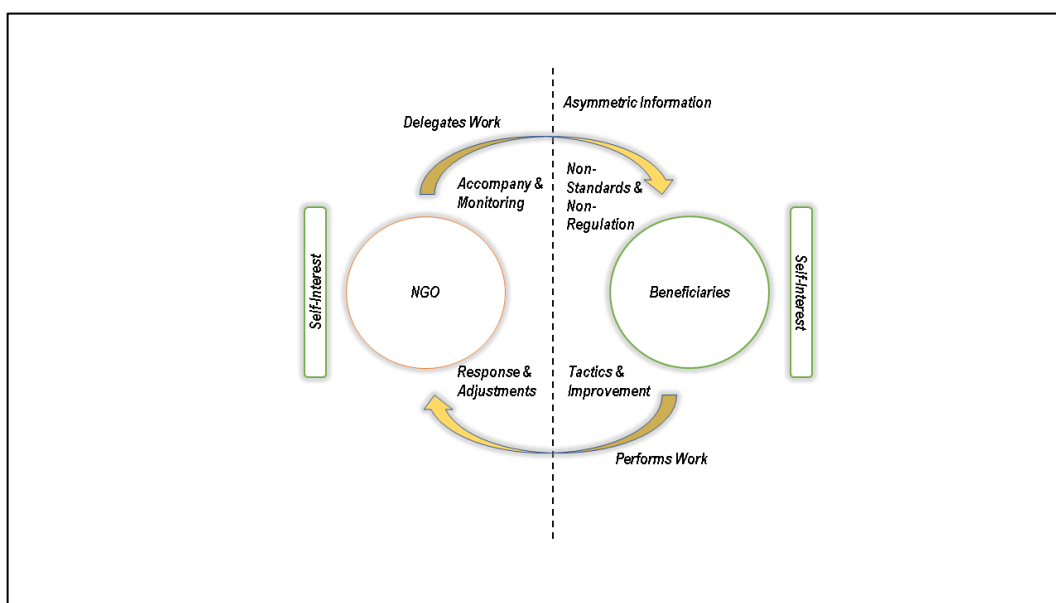
tetapi cerdas. Hal itu hanya bisa dilakukan ketika berhasil menelusuri lebih teliti.

2.3.2 Hubungan antara LSM (*Agent*) dengan Kolaborator/Penerima Manfaat (*Sub-Agents*)

Pada gambar 2.3, NGO/LSM ditempatkan pada posisi di sebelah kiri, dan penerima manfaat di sebelah kanan. Hubungan antara LSM dengan penerima manfaat program ini dilihat sebagai hubungan antara *agent* dengan *sub agents/entity*. Posisi penerima manfaat dapat diposisikan sebagai *sub agents*, juga sebagai entitas oleh dua alasan. Sebagai sub agen, penerima manfaat melakukan beberapa tugas yang berkaitan dengan agennya. Sub agen dapat berbentuk sebuah organisasi/lembaga/komunitas/kolektif.

Berikut ini ialah ilustrasi hubungan antara pihak LSM (*agents*) dengan Penerima manfaat (*sub agents/entities*).

Ilustrasi Hubungan antara LSM dengan Penerima Manfaat



Gambar 2.3 Ilustrasi Hubungan antara LSM dengan Penerima Manfaat

Sumber: Ulasan Penulis

2.4 Teori Pemangku Kepentingan/*Stakeholder Theory* sebagai Lensa Penelitian

Menurut Freeman (2015) pengertian luas dari pemangku kepentingan/*stakeholders* adalah semua pihak yang terdampak atau terpengaruh oleh perusahaan. Dalam arti sempit, pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan ditunjuk sebagai pemasok, pelanggan, karyawan, pemodal, dan komunitas. Teori pemangku kepentingan adalah seperangkat preposisi yang menunjukkan bahwa manajer perusahaan memiliki kewajiban kepada sekelompok/beberapa kelompok pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan merupakan *twist irony* dari pemegang saham, itu menandakan bahwa perusahaan memiliki kewajiban yang lebih luas daripada apa yang diasumsikan oleh teori ekonomi tradisional.

Menurut teori pemangku kepentingan, suatu perusahaan tidak hanya bertanggungjawab kepada pihak pemegang saham/sponsor/penyandang dana, tetapi lebih banyak pihak yang tanpa mereka, perusahaan tidak dapat beroperasi. Teori pemangku kepentingan sangatlah cocok mengingat LSM yang sangat multi-dimensi. Baik itu dimensi sosial, ekonomi dan politik. LSM mempunyai tanggungjawab moral dan pelayanan kepada publik sehingga diperlukan pemetaan pihak-pihak yang beririsan dan berkepentingan dalam aktivitas LSM. Apabila dikontekskan dalam penelitian akuntabilitas LSM, sebuah lembaga harus memetakan pihak-pihak pemangku kepentingan yang terdampak oleh aktivitas LSM.

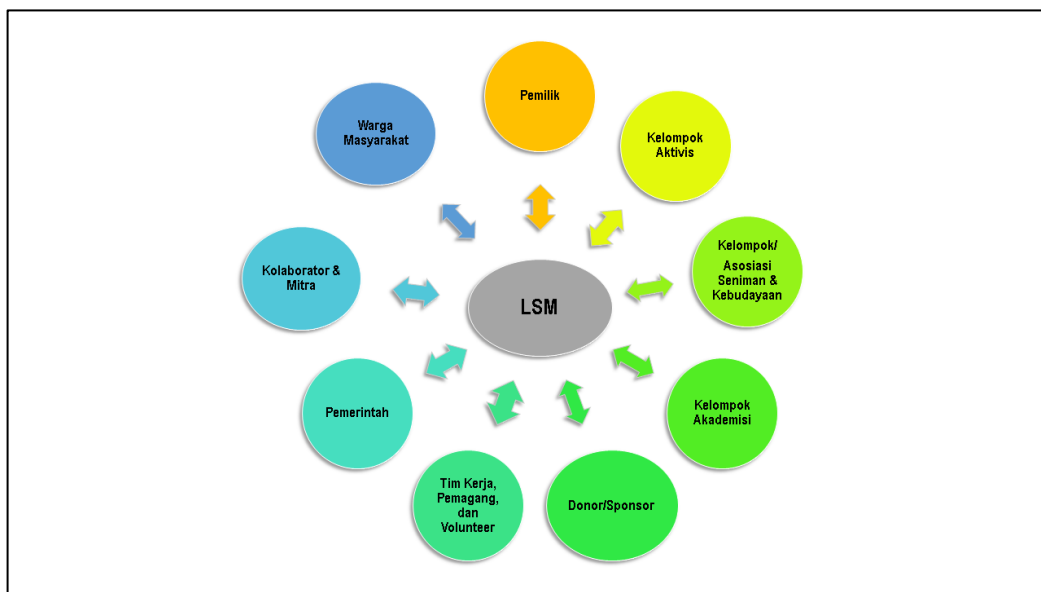
LSM harus memperhatikan program yang mereka tawarkan, apakah pemangku kepentingan menginginkan atau membutuhkan program tersebut? Apakah program tersebut membawa dampak bagi para pemangku kepentingan? Apakah para kolaborator semakin kreatif dan inovatif saat dilibatkan ke dalam program? Apakah tim kerja betah berada di lokasi

kantor? Apakah mereka menggunakan tenaga, usaha, dan kreativitasnya untuk merealisasikan program secara lebih baik dari waktu ke waktu? Apakah nilai-nilai lembaga mendukung masyarakat lokal? Apakah memperhatikan peningkatan kualitas kehidupan? Memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal? Apakah program menciptakan nilai untuk keberlanjutan program dan lembaga itu sendiri kedepannya? Hal-hal yang menyangkut cara perusahaan harus bertindak dan cara manajer mengambil keputusan itulah yang disebut oleh (Freeman 2015) sebagai “inti normatif” yang berkaitan erat dengan teori kepentingan.

Tugas seorang manajer atau seorang *entrepreneur* adalah mengatur bagaimana semua kepentingan tersebut mengarah ke arah/arus yang sama? Lantas, di mana peran seorang akuntan? Akuntan menurut (Godfrey, 2010) dibutuhkan untuk memberikan informasi yang bernilai kepada manajer untuk mengambil keputusan. “*Accounting is needed to help managers make decisions, not to make decisions for them*”, Godfrey (2010:298). Jadi, seorang akuntan perlu memahami dengan baik visi, misi, dan nilai-nilai yang diyakini perusahaan, seorang akuntan juga perlu memahami konflik kepentingan yang terjadi di antara para pemangku kepentingan yang tergambarkan pada kerangka teori agensi sebelumnya, bahwa ada informasi asimetris yang mungkin timbul diantara pemangku kepentingan tersebut. Seorang akuntan memiliki pengetahuan internal yang tidak dapat ia beberkan begitu saja ke semua pihak. Inilah cikal bakal munculnya teori sinyal/*signalling theory*. Bagaimana pemangku kepentingan menangkap sinyal yang diberikan oleh perusahaan agar dapat memahami bahwa perusahaan beroperasi dengan baik sesuai dengan keinginan pemangku kepentingan.

Berikut ini pemetaan pemangku kepentingan yang diadaptasi dari penelitian (Freeman 2015).

Ilustrasi Pemetaan Pemangku Kepentingan LSM



Gambar 2.4 Ilustrasi Pemangku Kepentingan

Sumber: Ilustrasi Pemangku Kepentingan

2.5 Kontrak/*Contracting Theory* sebagai Lensa Penelitian

Menurut (Godfrey et. al., 2010), perusahaan merupakan suatu perikatan hukum (*legal nexus*) antara pemasok dengan konsumen faktor produksi. Perusahaan sudah memiliki kontrak langsung ataupun tidak langsung dengan semua penyedia/pemasok sumber daya yang digunakan. Maka, fungsi kontrak, yaitu memusatkan atau menghubungkan konsumen dengan berbagai pemasok faktor produksi/bahan baku. Kontrak terjadi ketika perusahaan telah mengizinkan timbulnya biaya-biaya kontrak dan menegosiasikan persyaratan penjualan/pertukaran nilai, sebab perusahaan merupakan bentuk perhubungan kontrak yang paling efisien dalam mengatur dan mengoordinasikan kegiatan ekonomi dan mengurangi biaya kontrak. Maka dari itu, penting untuk mengenal/mengidentifikasi bentuk perusahaan/lembaga sehingga mengetahui

jenis kontrak yang terjadi. Menurut Godfrey, biasanya kontrak terdiri atas dua jenis, yaitu 1) kontrak manajemen, dan 2) kontrak utang.

Sedangkan, Andrew dan Samantha (2002) mendefinisikan kontrak sebagai hubungan yang dibuat dengan tingkat kebebasan tertentu dan sesuai dengan setidaknya terdapat beberapa kepentingan para pihak yang terlibat. Jenis kontrak yang ideal dilakukan tanpa paksaan atau dengan paksaan dan bermanfaat bagi semua pihak, walaupun tidak harus sama-sama menguntungkan. Yang perlu ditekankan dalam kontrak atau ikatan kerjasama ini ialah *use value* (nilai kegunaan/nilai kebermanfaatannya), ketimbang *exchange value* (nilai pertukaran).

Kontrak yang ideal tentu diasosiasikan dengan kompetisi sempurna yang merupakan ciri dari ekonomi neo klasik, selain itu kontrak eksplisit dapat terjadi di antara pihak-pihak yang kepentingan dan pandangannya tidak sesuai. Kebalikannya, kontrak implisit terjadi di mana tidak ada niat untuk melakukan kontrak. Kontrak juga cenderung membatasi spontanitas dari pihak terkait, untuk misalnya mengubah kondisi atau sesederhana menyatakan keinginan mereka. Penelitian ini mengabaikan kontrak yang ideal karena peneliti mengasumsikan bahwa orang-orang yang terlibat di dalam LSM sangatlah beragam dan sifatnya sangat dinamis.

Kontrak eksplisit diperlukan dalam keadaan tertentu dan di antara kelompok tertentu, namun tidak berlaku untuk semua kelompok. Proses tawar-menawar semestinya dapat terjadi oleh semua pemangku kepentingan sebelum bahkan setelah menandatangani kontrak apabila lembaga benar-benar menjunjung tinggi demokrasi.

Berikut ini adalah skala/peringkat kontrak berdasarkan visibilitasnya menurut Andrew and Samantha (2002).

1. *Explicit recognized contracts*/Kontrak yang diakui secara eksplisit (tertulis atau lisan, dapat melalui pihak ketiga).
2. *Implicit recognized contracts*/Kontrak yang diakui secara implisit (diakui oleh pihak-pihak yang terlibat dan/atau signifikanlain, seperti pemerintah, regulator, atau mitra).
3. *Implicit unrecognized contracts*/Kontrak implisit yang tidak diakui (tidak diakui oleh pihak-pihak yang terlibat, tetapi diakui oleh orang lain (tertentu) yang 'peka', seperti akademisi, novelis, dan aktivis). Jika pihak-pihak yang terlibat melalui beberapa proses sensitisasi, kemungkinan pengakuan itu akan mengikuti.
4. *No contracts*/Tidak ada kontrak.

2.6 Tangga Akuntabilitas Stewart (1984)/Stewart Ledger of Accountability

Stewart (1984) membedakan elemen "*account*" dan "*holding account*" sebagai berikut:

"Element of account: the need for information including the right to question and debate the information as a basis for forming judgement". (p.15)

"Element of holding to account: "the judgement and action taken on the basis of that judgement, which is an exercise power". (p.15)

Elemen "akun" dapat diartikan sebagai hak untuk mempertanyakan dan mendebat sebuah informasi sebagai landasan untuk melakukan "penilaian". Sedangkan, Elemen "memegang akun" dapat diartikan sebagai penghakiman dan tindakan yang dilakukan berdasarkan penghakiman tersebut *to exercise power*/untuk melatih kekuatan/kekuasaan. Sayangnya, Stewart tidak menjelaskan hubungan antara pihak akun dan

memegang akun secara spesifik, apakah hubungan yang tertaut oleh kepentingan yang sifatnya sementara, ataukah hubungan kedekatan/*bonding* yang sifatnya berkelanjutan dan jangka panjang? Stewart juga tidak menjelaskan “kekuatan” yang dimaksud, apakah menyinggung hukum atau perundang-undangan? Ataukah kekuatan/kekuasaan dalam arti yang luas?

Seperti yang diulas oleh peneliti sebelumnya, (Othata, 2010) bahwa Stewart menyiratkan bahwa akuntabilitas adalah produk dari persyaratan hukum formal, demikian juga kekuasaan yang merupakan atribut hukum (formal dan legal). Masalah dari pemahaman seperti ini tentang akuntabilitas dan kekuasaan ialah, mengabaikan konteks sosial, budaya, nilai-nilai lokalitas, perilaku dan tindakan manusia. Hukum hanya semacam perangkat aturan normatif yang mengatur perilaku masyarakat yang sifatnya kaku, sedangkan perubahan perilaku masyarakat sangatlah dinamis. Perumusan Stewart (1984) tentang akuntabilitas akan berimplikasi membatasi penjelajahan ke wilayah akuntabilitas yang baru dan mengabaikan bahwa ada mekanisme dan aturan non-formal yang berpengaruh di dalam LSM.

Pemahaman yang sedikit lebih maju oleh Laughlin (1996) yang menggambarkan bahwa tautan/*link* dan ikatan/*bonding* masing-masing sebagai bentuk akuntabilitas “kontraktual” dan “komunal”, dan bahwa keduanya merupakan bentuk akuntabilitas dan sama-sama kuat dalam pelaporan dan pengendalian mereka. Perbedaannya hanyalah, yang satu formal, dan yang satu informal.

Memahami hubungan ekonomi antara pihak Donor dengan Lembaga Tanahindie dalam penelitian akuntabilitas dengan lensa teori agensi adalah penting sebab memiliki keterkaitan yang erat jika ingin

menempatkannya tangga akuntabilitas (Stewart, 1984). Di level paling dasar, Lembaga pertama-tama mesti memiliki unsur kebenaran dan legalitas. Hal itu terwujud dalam status lembaga secara hukum dan kebenaran aktivitas menurut kontrak/perikatan/kesepakatan dengan *principal*/pihak sponsor/investor.

Penelitian akuntabilitas menurut tangga akuntabilitas Stewart dinyatakan dalam (Othata, 2002) sangat bergantung pada pemenuhan persyaratan *legal-formal*. Implikasi dari akuntabilitas yang dititikberatkan pada pemenuhan persyaratan *legal-formal* ialah adanya mekanisme prosedural dan keputusan yang terotoriasi yang membatasi inisiatif, spontanitas, siasat, ataupun mekanisme kultural lembaga/organisasi.

Persepsi manajemen soal akuntabilitas juga menjadi perhatian penelitian ini. Jika akuntabilitas dimaknai sebagai pemenuhan persyaratan *legal-formal*, maka fokusnya dititik beratkan pada penyelesaian laporan yang sesuai dengan pedoman baku yang ditentukan oleh lembaga donor. Apakah dengan pemenuhan laporan pertanggungjawaban kepada donor cukup untuk menyukseskan akuntabilitas LSM? Ataupun ada hal lain yang lebih urgen untuk mengakselerasi praktik akuntabilitas LSM?

Penelitian yang dilakukan oleh (Coule, 2015; M. Dewi, 2017a) menilai lensa teori agensi tidak cocok untuk dipakai untuk membaca relasi antara pihak agensi dengan penerima manfaat program sebab menurut M. Dewi (2017:54) pihak donor (*principal*) cenderung mendominasi hubungan. Maka untuk membaca akuntabilitas penerima manfaat perlu dibaca menggunakan lensa yang lain, yaitu teori pemangku kepentingan/*stakeholder theory*.

Penelitian ini justru menilai bahwa kedua lensa tersebut bisa dipakai untuk mempertegas sudut pandang penelitian sejak awal, yaitu untuk

melihat hubungan antara pihak Lembaga Tanahindie dengan para penerima manfaat secara *non-dichotomy*. Hubungan antara Lembaga Tanahindie dengan penerima manfaat adalah hubungan yang egaliter/setara walaupun sarat akan kepentingan. Benturan kepentingan yang terjadi di antara pemangku kepentingan perlu untuk dinegosiasikan. Teori agensi tidak mengenal proses negosiasi atau dialog di antara dua belah pihak, sehingga untuk mengidentifikasi proses negosiasi wacana kita perlu menggunakan lensa teori pemangku kepentingan/ *stakeholder theory*.

Argumen yang disampaikan oleh Burall dan Neligan (2003), justru memperkuat pandangan non-dikotomi bahwa reformasi terhadap mekanisme akuntabilitas tidak dapat diterapkan pada setiap organisasi, tidak hanya karena perbedaan radikal pemangku kepentingannya, tetapi juga kebijakan dan proses yang bekerja untuk satu pemangku kepentingan mungkin saja menjadi sulit untuk diikuti oleh pemangku kepentingan lainnya.

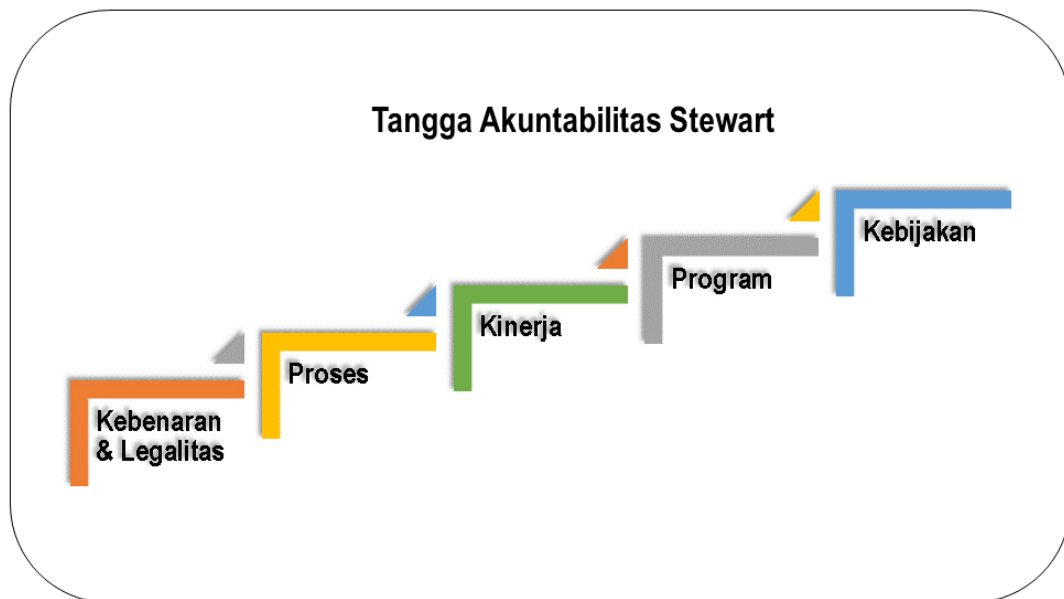
Table 2.1 Deskripsi Tangga Akuntabilitas Stewart (1984)

Dasar Pertanggungjawaban	Deskripsi
1. <i>Probity and Legality</i> /Kebenaran dan Legalitas	Kebenaran dimaknai sebagai kepatuhan kepada cita-cita tertinggi/prinsip yang dipegang. Apakah Lembaga Tanahindie memegang teguh dan mempraktikkan prinsip yang diyakininya? Legalitas dimaknai sebagai praktik yang dilakukan sesuai dengan Undang-undang dan terotorisasi.

2. <i>Process/Proses</i>	Proses memastikan apakah langkah-langkah yang dilakukan sudah sesuai dengan pedoman pelaporan; memperhatikan efisiensi dalam pemanfaatan sumberdaya dan memastikan tidak terjadi maladministrasi?
3. <i>Performance/Kinerja</i>	Menentukan bagaimana cara mengukur keberhasilan kegiatan atau program.
4. <i>Programme/Program</i>	Memastikan apakah pekerjaan dan ikhtiar yang dilakukan telah mencapai tujuan dan terintegrasi dari hulu ke hilir.
5. <i>Policy/Kebijakan</i>	Menyusun standar baku dan kebijakan sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemangku kepentingan.

Sumber: Diadaptasi dari Stewart (1984:17-18)

Ilustrasi Tangga Akuntabilitas Menurut Stewart (1984)



Gambar 2.5 Ilustrasi Tangga Akuntabilitas Stewart (1984)

Sumber: Ulasan Penulis

Maka, berdasarkan ulasan di atas, penelitian ini berupaya mengidentifikasi penerapan akuntabilitas di Lembaga Tanahindie menurut tangga akuntabilitas Stewart, lebih lanjut mengidentifikasi pola kerja dan perilaku pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya, yang mempengaruhi akuntabilitas mereka.

2.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu terkait akuntabilitas LSM, antara lain:

Table 2.2 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN	FOKUS GEOGRAFIS
1.	Dewi Miranti K., Melina Manochin, Ataur Belal (2021).	<i>Towards a Conceptual Framework of Beneficiary Accountability by NGOs: An Indonesian Case Study</i>	-	Studi kasus.	Penelitian ini mengkonseptualisasikan akuntabilitas penerima manfaat (<i>beneficiary accountability</i>) dalam empat atribut, yaitu santai, berbasis tindakan, quasi-instrumental, dan berfokus pada kemandirian penerima manfaat. Penelitian ini berpendapat bahwa ini lebih erat terkait dengan bentuk akuntabilitas informal daripada bentuk formal yang umumnya terkait dengan akuntabilitas donor. Mengingat sifat informal ini, LSM dapat didukung oleh pemangku kepentingan mereka (misalnya sukarelawan). Penelitian ini mendorong penelitian masa depan seperti memeriksa bagaimana karakteristik,	Jawa Barat, Indonesia.

					operasionalisasi, dan pendekatan LSM terhadap penerima manfaat mereka. Lebih lanjut memberikan ilustrasi empiris dari kerangka konseptual penerima manfaat dalam makalah ini.	
2.	Cordery, C., Aatur Rahman Belal, dan Ian Thomson (2019).	<i>NGO Accounting and Accountability: Past, Present and Future.</i>	-	Tinjauan umum.	Penelitian ini tidak bisa memecahkan masalah definisi yang banyak ditangani oleh peneliti LSM. Penelitian ini menemukan isu atau masalah khusus yang dihadapi LSM yaitu dalam hal ukuran organisasi, sifat organisasi, dan fokus geografis oleh karena itu praktik akuntansi dan akuntabilitas terkait LSM juga sangat bervariasi. Saran untuk penelitian akuntabilitas LSM di masa depan untuk tidak melihat secara dikotomi, sebaliknya akuntabilitasdonor memiliki fitur akuntabilitas penerima manfaat yang dapat	Global

					dimobilisasi untuk kepentingan penerima manfaat yang kurang beruntung.	
3.	Dewi Miranti K (2017)	<i>An In-Depth Case Study of Beneficiary Accountability Practices by an Indonesian NGO</i>	Stakeholder Theory, (Freeman, 1984) dan Social Capital Framework (Nahapiet & Ghoshal, 1998)	Interpretatif dengan sudut pandang konstruktivis.	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas penerima manfaat (sebagai fokus utama kegiatan) dipahami oleh peserta dalam penelitian sebagai praktik non-prosedural (dalam hal pemberian bantuan, mengungkapkan informasi keuangan atau memberdayakan penerima manfaat secara strategis untuk mencapai tujuan mereka. Definisi itu mencerminkan bagaimana mekanisme akuntabilitas kepada penerima manfaat terkait erat dengan sosialisasi/bentuk akuntabilitas informal daripada bentuk instrumental/formal. Peneliti menemukan potensi menarik untuk penelitian akuntabilitas kedepannya dalam hal pengelolaan alat akuntabilitas visual yaitu media sosial, bagaimana LSM memposting	Jawa Barat & Jawa Tengah, Indonesia

					aktivitasnya sehari-hari (mempublikasikan kegiatan) dan nilai-nilai organisasi lewat media sosial seperti Instagram, Facebook, dll.	
4.	Bawole, Justice N. dan Aechariah Langnel (2017)	<i>Downward Accountability of NGOs in Community Project Planning in Ghana</i>	Stakeholder Theory, (Freeman,1984).	Interpretatif dengan sudut pandang investigasi.	Meskipun masyarakat terlibat dalam proses perencanaan proyek dalam banyak hal, mereka terbatas dalam keterlibatan untuk mendukung acara dan keputusan. Keterlibatan masyarakat sebagian besar hanya kemunculan belaka, bersifat retorik, dan menghiasi legitimasi yang sama sekali tidak memenuhi kriteria pemberdayaan yang mendorong akuntabilitas ke bawah.	Saboba, Ghana
5.	Ratna Ayu Damayanti, Syarifuddin, Darmawati, dan Aini Indrijawati (2012).	[Re]konstruksi Akuntabilitas: Sebuah Tinjauan Akuntansi dan Sistem Informasi dari Perspektif Lokal	Tangga Akuntabilitas, (Stewart, 1984), Kearifan Lokal, (Wahid,1992), Penggunaan	Interpretatif dengan cara pandang nominalis.	Masyarakat berharap bahwa akuntabilitas dapat meningkatkan pengungkapan informasi non-akuntansi dan nonkeuangan. Dalam hal ini, masyarakat harus dilibatkan ketika memformulasikan bentuk akuntabilitas sebab mereka sebagai elemen pemangku kepentingan merupakan	Sulawesi Selatan, Indonesia

			Informasi Akuntansi, (Hansen, 2005).		kelompok atau individu yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi yang terwujud dalam akuntabilitas. Penelitian ini memberi masukan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyesuaikan model pengelolaan dan pelaporan yang memperhatikan indikator ekonomi dan keuangan yang lebih tradisional sehingga mudah dipahami oleh masyarakat.	
6.	Daphne Louise Rixon (2007).	<i>A Stakeholder Reporting Model for Semi-Autonomous Public Sector Agencies: The Case of The Workers' Compensation Agency in</i>	Resource Dependency Theory (Pfeffer dan Salancik, 1978) , Stakeholder Salience Theory (Mitchell et all, 1997),	Studi kasus dengan cara pandang beragam.	Akuntabilitas, terbukti, ditingkatkan ketika pemangku kepentingan lebih terlibat secara penuh atau aktif dalam lembaga, daripada secara pasif menerima informasi dan memberikan umpan balik tentang rencana organisasi. Dengan memanfaatkan gaya manajemen yang melibatkan pemangku kepentingan, lembaga dapat menunjukkan akuntabilitas dengan lebih baik. Model pelaporan pemangku kepentingan memiliki	Newfoundland, Kanada

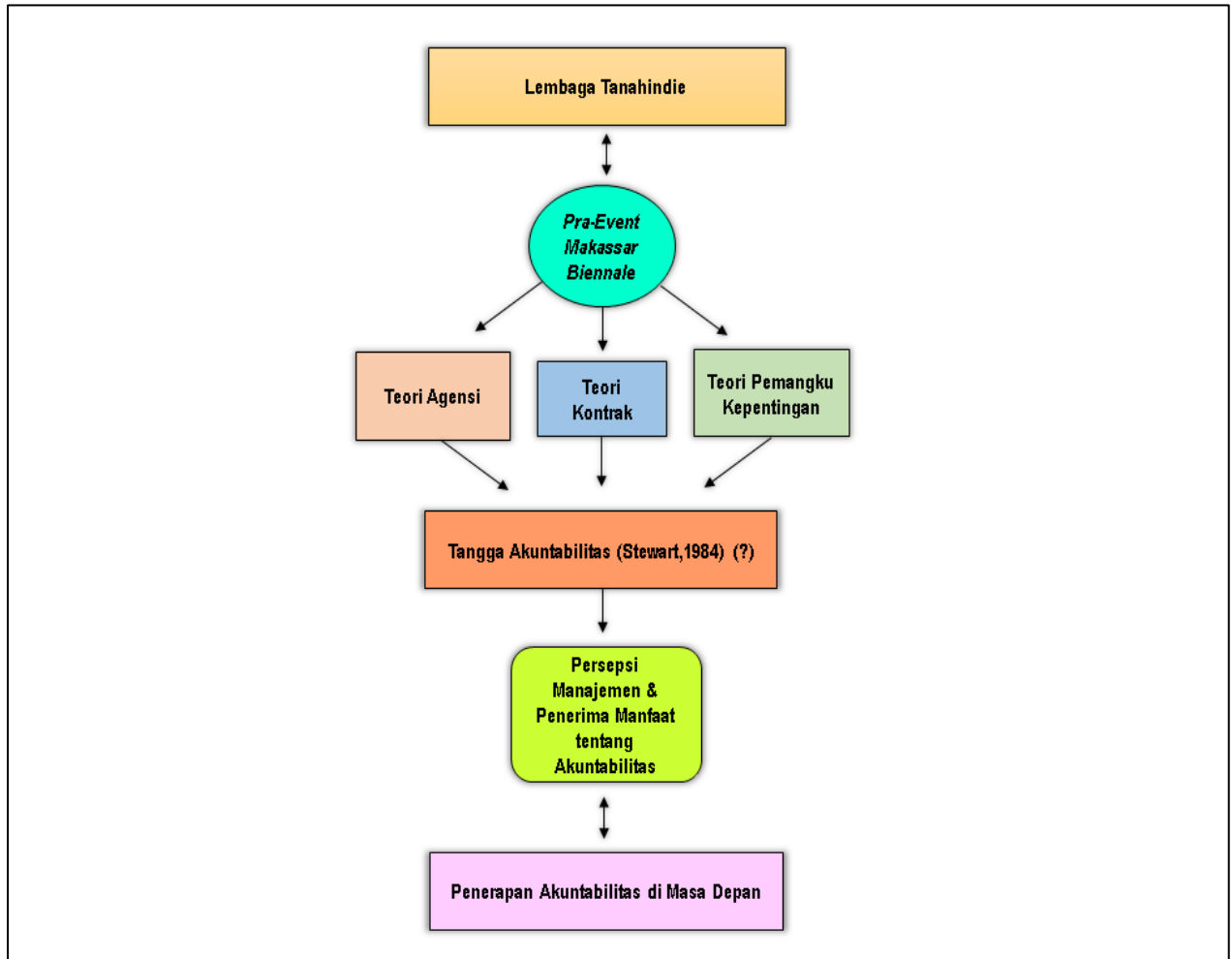
		<i>Nefoundland, Canada (2007)</i>	Ladder of Stakeholder Management and Engagement, Friedman and (Miles, 2006), dan Ladder of Accountability, (Stewart, 1984)		nilai prediktif karena berkonsultasi dan melibatkan pemangku kepentingan untuk memastikan ekspektasi akuntabilitas mereka. Penelitian ini mengembangkan kerangka pelaporan kinerja multi-dimensi yang mengidentifikasi kebutuhan pemangku kepentingan. Model yang dikembangkan berdasarkan pada badan sektor publik yang didanai sendiri, oleh karena itu penelitian ini tidak dapat menjadi acuan untuk mengeneralisir penelitian akuntabilitas di sektor publik lain.	
7.	Unerman Jeffrey & Brendan O'Dwyer (2006).	<i>On James Bond and the Importance of NGO Accountability</i>	-	Tinjauan umum.	Banyak aspek akuntabilitas LSM yang harus dieksplorasi secara lebih mendalam pada studi di masa depan. Beberapa masalah yang telah diperiksa dalam studi ini yaitu LSM yang menempati tempat di sektor publik maupun privat atau gabungan antara keduanya, dan mekanisme untuk akuntabilitas efektif oleh LSM dibedakan	Global

					berdasarkan mekanisme yang cocok, tugas akuntabilitas, dan bentuk organisasinya.	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Penelitian Terdahulu. Diakses di Google Scholar, <https://scholar.google.com/>.

Maka, berdasarkan tinjauan literatur di atas dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka kerangka pemikiran sebagai acuan pembahasan dalam penelitian ini ditampilkan sebagai berikut.

Kerangka Pemikiran



Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran

Sumber: Ulasan Penulis

3.1 Rancangan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah pendekatan kualitatif, *grounded theory*. Menurut Parker (1997:241), "*Grounded theory studies can help accountants, auditors, managers, and policy makers discover what is happening, how things are done, why and when organization members do what they do and how component parts (people, organizational units, etc.) interact*". Untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif, peneliti berpartisipasi secara aktif bahkan tenggelam ke dalam penelitian guna mengeksplorasi lebih lanjut penelitian tentang akuntabilitas LSM yang belum dijangkau oleh peneliti sebelumnya dan melakukan perbandingan konstan antara teori/konsep dengan pengalaman, perilaku, dan perspektif pegiat LSM di sektor Pendidikan, Seni, dan Kebudayaan Kontemporer. Fokus penelitian ini akan mengarah pada deskripsi yang kuat dan tebal berdasarkan *setting* pribadi atau konteks keadaan subjek penelitian yang tidak terlepas dari faktor geografis/kewilayahan karena berpengaruh pada logika bekerja. Kabupaten/kota yang menjadi lokus penelitian ini, yaitu Indonesia Timur (dilalui garis *Wallacea*), antara lain Makassar, Pangkep, Parepare, Bulukumba, Labuan Bajo, dan Nabire.

Dengan metode ini peneliti akan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan FGD sambil mencatat (*note-taking*). Setelah itu melakukan pengkodean/*coding* melalui tinjauan literatur dan iterasi, sambil mengurutkan mereka dengan urutan tahap/pola/alur yang nampak jelas. Pola iterasi tersebut kemudian disajikan dalam bentuk awan kata ataupun kerangka teori yang dikembangkan. Penelitian ini diharapkan mampu memperoleh temuan orisinal karena berangkat dari pengalaman subjektif para aktor penyelenggaran dan kontributor program *pra-event* Makassar Biennale 2020 Menghambur Menyigi Sekapur Sirih dan mendorong teori baru tentang akuntabilitas LSM. Selain itu,

memberikan interpretasi yang mencantumkan suara orang-orang (para informan) yang diteliti (Adibah, 2018).

3.2 Kehadiran Peneliti

Peneliti pernah terlibat aktif sebagai peserta lokakarya penulisan dan penelitian dalam program *pra-event* Makassar Biennale dengan judul program “Menghambur Menyigi Sekapur Sirih” tahun 2020. Jangka waktu program tersebut berlangsung selama tiga bulan, dimulai sejak bulan September hingga November tahun 2020. Program tersebut menghasilkan luaran sebuah buku etnografi berjudul *Ramuan di Segitiga Wallacea: Siasat Pengobatan Warga Selat Makassar, Laut Flores, hingga Teluk Cendrawasih* yang dapat diakses di <https://www.goodreads.com/book/show/56624749-ramuan-di-segitiga-wallacea>. Setelah selesai mengikuti program tersebut, peneliti melanjutkan program magang di Tanahindie dan melebur ke dalam manajemen Makassar Biennale 2021 sebagai akuntan dan membantu pengurusan administrasi program.

Dalam keterlibatan peneliti di kedua program tersebut, peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara dengan para narasumber pertama/primer tanpa membawa rancangan konseptual, proposisi, dan teori tertentu. Lewat pengamatan partisipatif, peneliti belajar untuk melihat, mengingat, merasakan, menggambarkan kembali proses yang dilalui bersama dengan informan, berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari informan baik dalam program yang diteliti maupun di luar penyelenggaraan program, melakukan pengamatan terperinci dan komunikasi interpersonal, dan menandai kejadian-kejadian penting. Membuat catatan lapangan, melakukan wawancara, diskusi kelompok terfokus dengan memperhatikan etika penelitian, seperti isu sensitif, privasi informan, pendekatan yang tidak menghakimi, dan komunikasi yang efektif.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Lembaga Tanahindie yang berlokasi di Jl. Abdullah Daeng Sirua (CV Dewi) No. 192 E, Makassar 90234. Lokasi tersebut merupakan kantor sekaligus toko buku dan usaha, antara lain Lembaga Tanahindie (lembaga dan penerbit), Penerbit Inninawa, Yayasan Makassar Biennale, Kampung Buku (perpustakaan dan toko buku), Komunitas Quiqui (komunitas perajut), dan Kedai Kopi Kampung Buku. Lokasi tersebut juga merupakan tempat tinggal Direktur Lembaga Tanahindie dan Yayasan Makassar Biennale.

3.4 Sumber Data

Menurut Uma Sekaran dan Roger Bougie (2017:130), data dapat diperoleh dari sumber primer atau sekunder. Data primer (*primary data*) mengacu pada informasi yang diperoleh langsung (dari tangan pertama) oleh peneliti terkait dengan variabel keterkaitan untuk tujuan tertentu dari studi. Sedangkan, data sekunder (*secondary data*) mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti buku, artikel, jurnal, tesis, media berita, diskusi, *symposium*, publikasi pemerintah, dan laporan program/tahunan perusahaan (Sekaran & Bougie, 2017).

Dalam penelitian ini, peneliti mengulas artikel, jurnal penelitian dan tesis terkait akuntabilitas LSM. Selanjutnya melakukan observasi awal, melakukan wawancara langsung dengan aktor atau *stakeholder* terkait program *pra-event* Makassar Biennale 2020, terlibat langsung dalam program tersebut sebagai peneliti, dan melakukan FGD/*Focus Group Discussion* dengan para aktor/informan kunci. Informan kunci memainkan peran penting karena beberapa kriteria, yaitu mereka memahami dengan baik tentang isu atau mereka berperan aktif dalam komunitas dan dalam penyelenggaraan program, mereka dapat memperkenalkan kepada orang yang relevan dan mendukung penelitian,

membuka peluang untuk penjelajahan ke tema atau topik baru, dan membantu dalam proses pembacaan isu, penerjemahan, dan interpretasi data.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Tinjauan Literatur

Pendekatan *grounded theory* sama sekali tidak bermaksud untuk menguji teori (Adibah 2018). Tinjauan literatur kritis berfungsi sebagai langkah yang melibatkan identifikasi tulisan yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (data sekunder). Terdapat kemungkinan bahwa beberapa variabel kritis tidak ditemukan dalam tahap pengumpulan data awal, karena pewawancara tidak dapat menyatakannya, tidak menyadari pengaruhnya, ataupun tidak dinyatakan dengan eksplisit (Sekaran & Bougie, 2017: 55). Tetapi, dalam pendekatan *grounded theory*, peneliti tidak perlu terlalu terpengaruh oleh literatur karena akan menutupi kreativitas dalam mengumpul, memahami, dan menganalisis data.

Menurut Sekaran & Bougie (2017: 62), adapun beberapa wawasan yang diperoleh dari tinjauan literatur kritis, yaitu: (1) Memperkenalkan subjek studi; (2) Menyoroti masalah (mengetahui bahwa kita tidak mempunyai kerangka konseptual yang baik untuk memahami subjek studi); (3) Meringkas penelitian yang sudah dilakukan sampai saat ini pada topik tersebut dengan cara yang meyakinkan pembaca bahwa penelitian ini benar-benar menelusuri subjek penelitian dan ingin berkontribusi pada pemahaman konsep, mengadopsi pendekatan kontijensi sebelumnya dengan lebih kreatif. Jika dihubungkan dengan pendekatan *grounded theory*, teori dasar dipakai hanya untuk dipinjam sementara sampai ditemukan konsep sebenarnya dari kancah. Teori yang ada hanya dipakai untuk membantu proses interpretasi/mendekati data (Adibah 2018).

3.5.2 Observasi Partisipan

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen pengumpul data. Proses pengumpulan data dimulai dari observasi dan wawancara secara mendalam yang secara umum tidak jauh berbeda dengan metode pada riset kualitatif lainnya. Perbedaannya terletak pada pemilihan fenomena yang dikumpulkan. Observasi dilakukan sebelum dan selama penelitian berlangsung, meliputi gambaran umum lembaga, suasana kehidupan sosial di lembaga, kondisi fisik, kondisi ekonomi dan sosial yang terjadi di Lembaga tersebut dan para penerima manfaatnya, baik yang individu maupun komunitas. Selain itu mengamati pendapat, emosi, tindakan dan tujuan, dan rentetan kejadian, seperti pertemuan-pertemuan diskusi dan agenda lainnya.

Observasi yang dilakukan yaitu melalui pendekatan partisipatoris. Dalam observasi partisipan, peneliti bertugas untuk mengumpulkan data dengan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari kelompok atau organisasi yang diteliti. Peneliti secara aktif dan intens hadir dalam rangkaian kegiatan *pra-event* Makassar Biennale, mulai dari pra, pelaksanaan, hingga pasca program. Dalam proses ini peneliti yang juga merupakan peserta dalam program *workshop* studi lapangan dan penulisan penelitian digolongkan sebagai partisipan penuh atas keterlibatan penuhnya di dalam program tersebut. Menurut Sekaran dan Bougie (2016:157), sebagai partisipan aktif, peneliti tidak hanya berperan sebagai penonton. Peneliti tidak menyembunyikan bahwa dia adalah seorang pengamat, namun sejak awal ia menjelaskan bahwa ia adalah seorang pengamat kepada komunitas/ lembaga yang diteliti. Maka dari itu, sangat penting bagi peneliti untuk mendapatkan izin dalam melaksanakan observasi partisipan.

3.5.3 Wawancara Semi-Terstruktur

Menurut Sekaran & Bougie (2016: 138-139) wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan ketika peneliti sejak awal sudah mengetahui informasi yang diperlukan. Sebaliknya, wawancara tidak terstruktur bertujuan untuk menyelidiki dan menggali beberapa faktor pada situasi yang mungkin menjadi pusat dari bidang permasalahan yang luas, yang memungkinkan ditemukannya suatu gejala yang lebih rumit dan serius. Dalam penelitian ini, peneliti telah menyediakan pertanyaan-pertanyaan untuk narasumber sambil membuka kemungkinan untuk munculnya atau berkembangnya pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan tanggapan narasumber. Beberapa pertanyaan juga dimodifikasi agar sesuai dengan kemampuan responden kunci seperti yang dilakukan oleh (Bawole and Langnel 2016) dalam meneliti akuntabilitas ke bawah/ *downward accountability* di LSM perencana proyek di Ghana. Peneliti melakukan wawancara dengan Direktur Program *Pra-event* Makassar Biennale 2020, manajer program, koordinator kota di lima komunitas penerima manfaat, beberapa anggota masyarakat, dan peserta program *Pra-event* Makassar Biennale 2020.

Wawancara dilakukan terhadap informan yang dianggap kompeten/ paling bisa mewakili, secara terpisah di lingkungan responden masing-masing. Adanya hambatan berupa kebijakan pemerintah berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan/PPKM membuat proses observasi dan wawancara ini dilakukan secara *hybrid*, datang langsung ke lokasi/ luring, dan lewat aplikasi *zoom meeting/online*. Setelah melakukan observasi dan wawancara, peneliti harus segera menuliskan hasil wawancara tersebut dan rangkuman kontak.

3.5.4 Diskusi Fokus Terarah/ *Focus Group Discussion*

Diskusi fokus terarah/ FGD merupakan kegiatan untuk membahas topik tertentu yang melibatkan orang-orang dari latar belakang yang serupa atau yang memiliki pengalaman bersama. FGD idealnya menghadirkan orang-orang berkualitas yang diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman tentang isu tertentu, baik itu pandangan, perasaan, sikap, motivasi, dan interaksi (M. Dewi 2017b).

Penelitian ini menggunakan FGD yang dikombinasi dengan wawancara semi-terstruktur. Perpaduan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dari individu yang berbeda di dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang persepsi mereka tentang akuntabilitas holistik LSM, mekanisme akuntabilitas holistik di Lembaga Tanahindie, bagaimana operasi modal sosial dapat mendukung akuntabilitas LSM. Selain itu, FGD juga menetapkan adanya 'efek kelompok' pada topik yang dibicarakan yang mungkin tidak dihasilkan saat wawancara individu (Agyemang et. al., 2009; M. Dewi, 2017b).

3.6 Analisis Data

Menurut (Budiasih dan Nyoman, 2014) analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi dan wawancara untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan temuannya kepada oleh orang lain. Data adalah produk dari proses penelitian bukan sekadar objek yang diamati. Peneliti adalah bagian dari situasi penelitian dan posisi, hak istimewa, perspektif, dan interaksi mereka memengaruhinya. Dalam proses analisis data, peneliti melakukan perbandingan konstan secara terus menerus (Glaser & Strauss, 1967), dan mengajukan pertanyaan terkait relevansi data yang diperoleh dengan permasalahan penelitian,

perbandingan data dengan konsep yang sudah ada, atau perbandingan data dengan data, kemudian menemukan kesamaan dan perbedaannya (Adibah, 2018).

Peneliti melakukan pengkodean secara sederhana. Proses pengkodean itu dimulai dari membaca transkrip wawancara dari baris ke baris, lalu memberi tanda/kode saat mengalami "*aha moment*" (Chametzky, 2016). Proses itu yang biasa juga diistilahkan sebagai momen eureka. Tetapi momen eureka tidak serta merta didapatkan ketika membaca transkrip, namun proses yang lebih panjang dan lama. Dalam proses pengkodean ini, peneliti memanfaatkan kemahirannya untuk menganalisa suatu gagasan atau ide yang muncul ke dalam suatu gagasan atau ide yang lebih besar. "Apakah data ini sebuah studi?" "Data ini mesti dikategorikan sebagai permasalahan apa?". Maka, penelitian dengan metode *Grounded Theory* memosisikan peneliti sebagai orang yang mempercayai diri sendiri, sebab pada akhirnya peneliti tidak terlalu menghiraukan teori-teori. Peneliti juga melakukan iterasi terhadap wawancara maupun FGD dengan memanfaatkan aplikasi Nvivo untuk menyajikan data, walaupun terdapat kekurangan menggunakan aplikasi ini, yaitu tidak punya kemahiran seperti yang dimiliki peneliti.

3.7 Pengecekan Validitas Temuan Penelitian

Penulis berusaha untuk berfokus pada dua aspek utama validitas temuan, yaitu keaslian dan masuk akal. Validasi merupakan masalah penting dan berpotensi menimbulkan masalah serius apalagi dalam ilmu sosial dimana terjadi fenomena "krisis validitas". Validasi penelitian dipandang sebagai persoalan meyakinkan pembaca tentang keaslian temuan penelitian, sementara di saat bersamaan memastikan bahwa penjelasan yang diuraikan masuk akal. Dari situ kita pahami bahwa validasi merupakan serangkaian proses yang tidak terpisahkan

dari upaya terus-menerus peneliti untuk mengembangkan penjelasan sebagai proyek penelitian terungkap dan jauh dari reduksi/ sekadar mengikuti kriteria yang telah ditentukan sebelumnya(Lukka and Modell, 2010)).

Menurut Sekaran dan Bougie (2017: 177) validitas didefinisikan sebagai sejauh mana instrument mengukur apa yang ingin diukur. Namun demikian, validitas memiliki konteks yang berbeda-beda. Hal ini mengacu pada sejauh mana hasil penelitian (1) secara akurat menunjukkan data yang dikumpulkan (validitas internal), dan (2) dapat digeneralisasikan atau diganti ke konteks atau keadaan yang lain (validitas eksternal). Menurut Sekaran dan Bougie, validitas menunjukkan tingkat di mana observasi secara akurat mencatat perilaku yang diamati oleh peneliti, sedangkan reliabilitas merujuk pada konsistensi dari observasi, misalnya pengamatan dari sudut pandang dua orang yang berbeda terhadap peristiwa yang sama di kesempatan yang berbeda, tetapi mendapatkan hasil yang sama/serupa. Peneliti melakukan presentasi hasil penelitian di hadapan informan secara langsung pada 7 Agustus 2022 di Kampung Buku untuk mendapatkan respon/tanggapan terhadap hasil penelitian.